

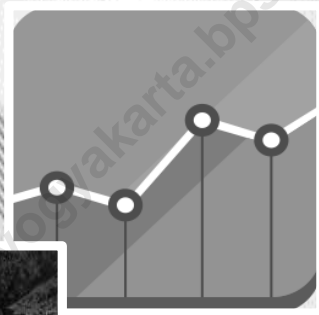
# DATA STRATEGIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2018



**DATA STRATEGIS**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**2018**



**DATA STRATEGIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**2018**

No. ISBN : -  
No. Publikasi : 34520.1812  
No. Katalog : 1103003.34  
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21,5 cm  
Jumlah Halaman : xvi + 184 halaman

Naskah:  
Bidang Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar Kulit:  
Bidang Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diterbitkan oleh:  
© Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian data seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

**DATA STRATEGIS**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**2018**

**TIM PENYUSUN**

Penanggung Jawab : Johanes De Britto Priyono

Editor : Soman Wisnu Darma  
: Alwan Fauzani

Naskah : Istanti

Penyunting Data : Istanti



## KATA PENGANTAR

Output utama Badan Pusat Statistik adalah data statistik yang bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa, peneliti, akademisi dan pemerintah. Kemudahan dalam mengakses data merupakan tolok ukur keberhasilan pelayanan bagi konsumen. Oleh karena itu, data akan dikemas dalam bentuk booklet dengan judul Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang disajikan adalah data yang bersifat umum, ringkas, strategis dan mencakup banyak hal.

Booklet akan memuat data tentang indikator sosial-ekonomi seperti Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Nilai Tukar Petani, Pertanian, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Kependudukan, dan indikator penting lainnya. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatannya, maka publikasi ini dilengkapi dengan penjelasan teknis dan analisisnya.

Semoga data yang tersajikan dalam *booklet* ini, menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna data. Kami menyadari bahwa *booklet* ini mungkin belum mampu memenuhi semua harapan para pengguna data. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami butuhkan demi penyempurnaan penerbitan selanjutnya.

Yogyakarta, November 2018  
Badan Pusat Statistik  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala,



Johanes De Britto Priyono



## RINGKASAN DATA STRATEGIS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Indikator	Tahun		
	2016	2017	2018
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Inflasi Kalender (%)	2,29	4,20	NA
2. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,26	NA
3. PDRB Perkapita ADHB (000 Rp)	29 589	31 677	NA
4. Rata-rata NTP	104,09	102,08	NA
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT,%), bulan Agustus	2,72	3,02	3,06*
6. TPAK (%), bulan Agustus	71,96	62,69	63,87*
7. Persentase Pekerja Formal Agustus(%)	45,09	45,99	48,40*
8. Persentase Pekerja Informal Agustus(%)	54,91	54,01	51,60*
9. Persentase Luas Lahan Pertanian (%)	75,69	74,72	NA
10. Luas Panen Tanaman Padi (ha)	158 132	158.818	NA
11. Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	55,82	55,48	NA
12. Produksi Padi (ton)	882 702	881 106	NA
13. Persentase Penduduk Miskin, Mar (%)	13,34	13,02	12,13
14. Jumlah Penduduk Miskin, Mar (000)	494,94	488,53	460,10
15. Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	354 084	374 009	409 744
16. Jumlah Penduduk bulan Juni	3 720 912	3 762 167	NA
17. Angka Harapan Hidup (tahun)	74,71	74,74	NA
18. IPM	78,38	78,89	NA
19. Gini Rasio Maret (%)	0,420	0,432	0,441
20. IPG	94,21	94,39	NA
19. IDI	85,58	83,61	NA

Catatan: NA : Data belum tersedia

\* : Februari

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Ringkasan Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Pendahuluan.....	1
Angka Inflasi.....	7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	19
Nilai Tukar Petani (NTP).....	31
Pertanian.....	41
Ketenagakerjaan.....	49
Kemiskinan.....	63
Kependudukan.....	81
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	91
Pendidikan.....	103
Kesehatan.....	117
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).....	125
Pola Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk. ....	133
Indikator Penting lainnya.....	145
Singkatan dan Akronim.....	177
Daftar Pustaka.....	178

## DAFTAR TABEL

<b>ANGKA INFLASI</b>		halaman
Tabel 2.1	Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional, 2017– 2018 (2012=100) .....	13
Tabel 2.2	Inflasi Bulan Desember 2017 dan Year on Year menurut pengeluaran (2012=100).....	14
Tabel 2.3	Andil Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Desember 2017 (2012=100) ..	15
Tabel 2.4	Perbandingan Inflasi Tahun ke Tahun Kota Yogyakarta dan Nasional, 2006-2017. ....	16
Tabel 2.5	Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Bulan Desember 2016-2017 untuk 23 Kota-kota Besar di Pulau Jawa. ....	17
Tabel 2.6	Laju Inflasi Tahun Kalender untuk 23 Kota-kota Besar di Pulau Jawa, 2013-2017... ..	18

## PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2017 (juta Rp).....	25
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2017.....	25
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional, 2016– 2017 (persen) ....	26
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional, 2016-2017 (persen) .....	27
Tabel 3.5	PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta ADHB dan ADHK 2010 menurut Pengeluaran, 2016-2017 (juta Rp) .....	28
Tabel 3.6	Distribusi PDRB DIY ADHB dan Laju Pertumbuhan DIY ADHK 2010 menurut Pengeluaran(persen).....	28
Tabel 3.7	Indikator Penting PDRB menurut Provinsi di pulau Jawa 2015-2017.....	29
Tabel 3.8	Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, dan Produk Domestik Bruto per Kapita, 2002-2017.....	30

## **NILAI TUKAR PETANI**

Tabel 4.1	Perkembangan Nilai Tukar Petani, Januari 2017 – Desember 2017 (2012 = 100).....	36
Tabel 4.2	Rata-rata Nilai Tukar Petani(NTP) 2009-2017.....	37
Tabel 4.3	Nilai Tukar Petani Subsektor Daerah Istimewa Yogyakarta, Januari 2017-Desember 2017 (2012=100).....	38
Tabel 4.4	Nilai Tukar Petani menurut Provinsi di Pulau Jawa, Tahun 2017.....	39
Tabel 4.5	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) D.I. Yogyakarta, Tahun 2017.....	40

## **PERTANIAN**

Tabel 5.1	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 (ha) .....	43
Tabel 5.2	Persentase Penggunaan Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	44
Tabel 5.3	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017. ....	45
Tabel 5.4	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	45
Tabel 5.5	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	46
Tabel 5.6	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	46
Tabel 5.7	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	47

## **KETENAGAKERJAAN**

Tabel 6.1	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2018(ribu).....	59
Tabel 6.2	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2018 .....	60
Tabel 6.3	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2018.....	61
Tabel 6.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Daerah istimewa Yogyakarta dan Nasional, 2014-2018.....	62

Tabel 6.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012-Agustus 2017(persen).....	63
Tabel 6.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2015-2017 (persen).....	64

## KEMISKINAN

Tabel 7.1	Jumlah Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah, 2014-2018 (ribuan jiwa).....	74
Tabel 7.2	Persentase Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018 (persen).....	74
Tabel 7.3	Garis Kemiskinan Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018 (rupiah/kapita/bulan) .....	75
Tabel 7.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018.....	75
Tabel 7.5	Indeks Keparahan (P2) menurut Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018.....	76
Tabel 7.6	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017(persen).....	76
Tabel 7.7	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (ribuan jiwa).....	77
Tabel 7.8	Garis Kemiskinan Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di Daerah istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (rupiah/kapita/bulan) .....	77
Tabel 7.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (persen).....	78
Tabel 7.10	Indeks Keparahan (P2) menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (persen).....	78
Tabel 7.11	Indikator Kemiskinan menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2017 - 2018.....	79
Tabel 7.12	Gini Rasio menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2002-2018.....	81
Tabel 7.13	Distribusi Pendapatan Penduduk Darah Istimewa Yogyakarta menurut Golongan Pengeluaran, 2002-2018.....	82

## PENDUDUK

Tabel 8.1	Penduduk menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017 .....	88
Tabel 8.2	Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	89

Tabel 8.3	Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	90
Tabel 8.4	Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2017.....	90
Tabel 8.5	Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/kota, 2010, 2016,dan 2017.....	91
Tabel 8.6	Presentase Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/kota, 2015-2017.....	91
Tabel 8.9	Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2017.....	92

## **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Tabel 9.1	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	101
Tabel 9.2	Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (tahun).....	101
Tabel 9.3	Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (tahun).....	102
Tabel 9.4	Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (tahun).....	102
Tabel 9.5	Pengeluaran Riil Per Kapita menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (Rp/tahun).....	103
Tabel 9.6	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2013-2017.....	103

## **PENDIDIKAN**

Tabel 10.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	111
Tabel 10.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2017.....	111
Tabel 10.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2016-2017.....	112
Tabel 10.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	112
Tabel 10.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.....	113
Tabel 10.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2016-2017.....	113

Tabel 10.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	114
Tabel 10.8	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2017.....	114
Tabel 10.9	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2016-2017.....	115
Tabel 10.10	Persentase Penduduk yang Buta Huruf menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.....	115
Tabel 10.11	Persentase Penduduk yang Buta Huruf menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2016-2017.....	116
Tabel 10.12	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi di Pulau Jawa, 2017.....	116
Tabel 10.13	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.....	117
Tabel 10.14	Banyaknya Sarana Pendidikan menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.....	117

## **KESEHATAN**

Tabel 11.1	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	123
Tabel 11.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang pernah Kawin menurut Kabupaten/kota dan penolong Proses Kelahiran terakhir, 2017.....	123
Tabel 11.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017.....	123
Tabel 11.4	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2013-2017.....	124
Tabel 11.5	Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.....	124
Tabel 11.6	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/mamakai Alat KB menurut Provinsi, 2013-2017	125

## **INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**

Tabel 12.1	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), 2013-2017.....	131
Tabel 12.2	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016-2017.....	132
Tabel 12.3	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2016-2017.....	133

## **POLA PENGELUARAN DAN KONSUMSI PENDUDUK**

Tabel 13.1	Pengeluaran Rumah Tangga menurut Kabupaten/kota, Makanan dan Non Makanan di D.I. Yogyakarta Tahun 2016 dan 2017 (Rupiah)	140
Tabel 13.2	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kabupaten/kota dan Jenis Makanan, Tahun 2016 dan Tahun 2017	140
Tabel 13.3	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan dan Kabupaten/kota, 2017 (Persen) .....	141
Tabel 13.4	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita menurut Kelompok Non Makanan dan Kabupaten/kota, 2017 (Persen) .....	142
Tabel 13.5	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2016 dan 2017.....	143
Tabel 13.6	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan dan Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, 2017(Kkal)....	144
Tabel 13.7	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan dan Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, 2017(gram)....	145

## **INDIKATOR-INDIKATOR LAINNYA**

Tabel 14.1	Nilai IPAK Tahun 2013-2018.....	152
Tabel 14.2	Indeks menurut Dimensi, Tahun 2013-2018.....	152
Tabel 14.3	Perbandingan IPAK 2013-2018 Berdasarkan Karakteristik Tertentu. ....	153
Tabel 14.4	Indeks Kebahagiaan menurut Karakteristik Demografi Daerah istimewa Yogyakarta, 2014 - 2017.....	159
Tabel 14.5	Indeks Kebahagiaan menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan D.I. Yogyakarta, 2014-2017.....	160
Tabel 14.6	Indeks Kebahagiaan menurut Pendapatan Rumah Tangga D.I. Yogyakarta, 2014- 2017.....	160
Tabel 14.7	Tingkat Kepuasan Sepuluh Aspek Kehidupan dan Provinsi di Pulau Jawa, 2017. ....	161
Tabel 14.8	Indeks Kabahagiaan menurut Klasifikasi Wilayah dan Provinsi di Pulau Jawa, 2017.....	162
Tabel 14.9	Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, 2013-2017.....	168

Tabel 14.10	Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2013-2017.....	168
Tabel 14.11	Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Komponen di D.I. Yogyakarta, 2017.....	169
Tabel 14.12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, 2013-2017.....	175
Tabel 14.13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2013-2017.....	175
Tabel 14.14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Komponen di D.I. Yogyakarta, 2017.....	176

<https://yogyakarta.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1	Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional ..... 11 2007-2017
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/kota..... 24 Tahun 2016-2017
Gambar 4.1	Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2017-2018..... 34
Gambar 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014-2018..... 56
Gambar 7.1	..... Koefisien Gini Menurut Kurva Lorent..... 68
Gambar 7.2	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin D.I. Yogyakarta, 2014-2018 71
Gambar 7.3	Perkembangan Gini Rasio Tahun 2014-2018..... 80
Gambar 9.1	Trend Pertumbuhan IPM D.I. Yogyakarta 2011-2017..... 99
Gambar 10.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017..... 109
Gambar 11.1	Angka Keluhan Kesehatan Tahun 2013-2017..... 121
Gambar 12.1	Indeks Demokrasi D.I. Yogyakarta menurut Aspek, Tahun 2017..... 129
Gambar 13.1	Persentase Rata-rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan, 2017 137
Gambar 13.2	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Per hari, 2017..... 138
Gambar 14.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2013-2017..... 150
Gambar 14.2	Indeks Pembangunan Gender 2013-2017..... 165
Gambar 14.3	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/kota, Tahun 2017..... 173

# Pendahuluan





## 1. Pendahuluan

Data Strategis D.I. Yogyakarta 2018 merupakan publikasi yang menyajikan data-data output dari survey/sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik(BPS). Indikator-indikator yang ditampilkan adalah data-data terkini. Informasi yang dimuat diharapkan mampu menggambarkan fenomena kondisi sosial ekonomi yang terjadi di suatu wilayah dari waktu ke waktu.

Data Sosial dan ekonomi seperti jumlah penduduk, pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemiskinan, angka inflasi, data produksi tanaman pangan dan ketenagakerjaan akan dikemas dalam bingkai metodologi, tabel, serta ulasan singkat. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi produk statistik BPS ke masyarakat umum. Kepada pihak pemerintahan, kumpulan data strategis ini dapat sebagai informasi awal identifikasi evaluasi pembangunan ekonomi sosial.

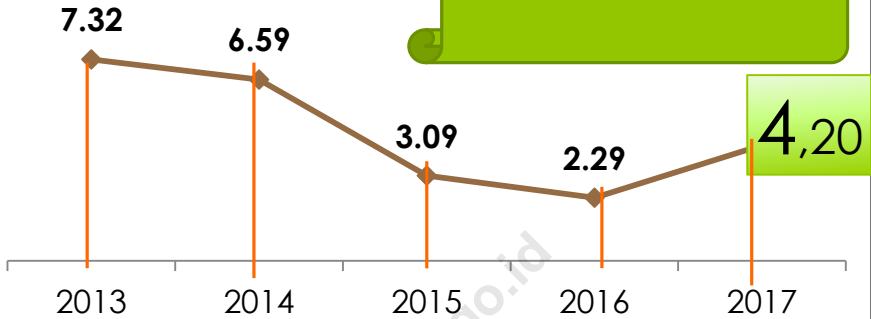
Perkembangan teknologi dan pesatnya pembangunan menuntut pemerintah bekerja efisien, efektif, dan tepat sasaran. Dalam mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, data akan disajikan menurut provinsi se-pulau Jawa dan angka Nasional. Selain itu, indikator-indikator ini akan disajikan secara series lima tahun terakhir. Berbeda dengan edisi sebelumnya, publikasi akan menampilkan infografis pada masing-masing sub-bab.

*Booklet* akan disajikan dalam 3 bagian. Dimulai dengan bagian pendahuluan, dilanjutkan dengan indikator ekonomi, indikator sosial, dan diakhiri dengan indikator lainnya. Bagian pertama memuat indikator makro ekonomi yang mengulas singkat dan jelas tentang angka inflasi, produk domestik regional bruto, nilai tukar petani, dan data pertanian. Pada bagian berikutnya akan mencermati data terkait indikator sosial makro seperti ketenagakerjaan, kemiskinan, kependudukan, dan lain-lain.



Peningkatan kesejahteraan petani lebih lambat dibanding sektor ekonomi lainnya

## Inflasi 2013-2014



## 3 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB



13,12%

Industri



10,32%

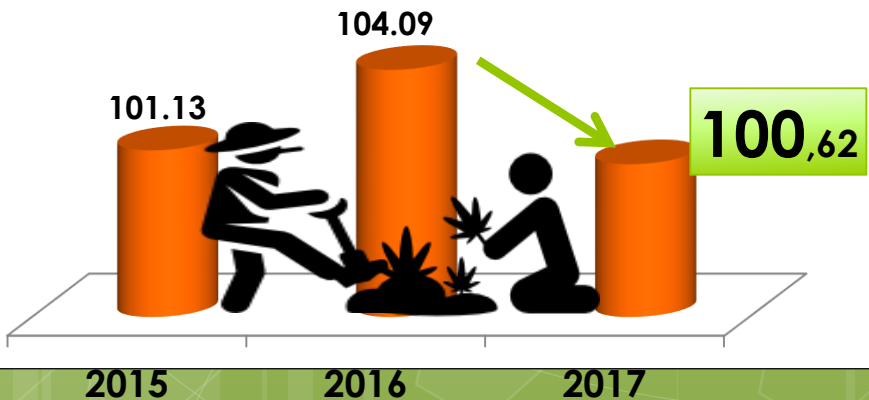
Kontruksi



10,01%

pertanian

## Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP)





### 2.1. Konsep dan Definisi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penyebab inflasi meliputi:

1. *Demand-Pull Inflation* artinya terjadinya kenaikan *aggregate demand* terhadap *resources* baik yang datang dari pemerintah maupun dari masyarakat dan dunia usaha.
2. *Cost-Push Inflation* artinya suatu keadaan dimana walaupun tidak terjadi kenaikan *aggregate demand*, harga-harga masih tetap mengalami kenaikan. Mungkin terjadi jika biaya upah-gaji karyawan perusahaan meningkat.
3. *Structural inflation* artinya terjadi karena terjadinya perubahan struktur ekonomi seperti dari pertanian ke non pertanian. Ini membawa perubahan pola permintaan yang akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga.

### 2.2. Penghitungan Inflasi

Mulai bulan Januari 2014, penghitungan IHK didasarkan atas pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 di 82 kota dan mencakup sebanyak 225 – 462 jenis komoditi. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks

Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)*. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan suatu rumus *Laspeyres* yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*). Rumus tersebut mengacu pada manual Organisasi Buruh Dunia (*Internasional Labor Organisaion/ILO*). Secara umum rumus inflasi adalah:

$$INF_t = \left( \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \right) \times 100$$

$INF_t$  : Inflasi/deflasi pada waktu(bulan atau tahun) (t)

$IHK_t$  : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (t)

$IHK_{t-1}$  : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (t-1)

Inflasi yang dihitung meliputi:

1. **Inflasi bulanan** yaitu inflasi yang terjadi selama 1 bulan tertentu. Dengan kata lain inflasi bulanan merupakan persentase perubahan IHK bulan tertentu terhadap IHK bulan sebelumnya.
2. **Inflasi tahun kalender/kumulatif** yaitu inflasi yang terjadi selama bulan Januari sampai dengan bulan tertentu atau persentase perubahan IHK bulan tertentu terhadap IHK bulan Desember tahun sebelumnya.
3. **Year on Year (YoY)** yakni inflasi yang terjadi selama setahun terakhir dari bulan tertentu tahun sebelumnya sampai dengan bulan yang sama tahun sekarang atau persentase perubahan IHK bulan tertentu tahun sekarang terhadap IHK bulan yang sama tahun sebelumnya.

**Angka inflasi disajikan dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu:**

1. Kelompok Bahan Makanan;
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau;

3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;
4. Kelompok Sandang;
5. Kelompok Kesehatan;
6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga;
7. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

### 2.3. Interpretasi Data

Terdapat tiga kelompok hitungan inflasi, yaitu:

- $INF_t < 0$  : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami penurunan dibandingkan (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga deflasi.
- $INF_t = 0$  : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) sama dengan (bulan atau tahun) (n-1).
- $INF_t > 0$  : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami peningkatan dibandingkan (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga inflasi.

#### Kategori inflasi:

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30%/ tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

### 2.4. Manfaat Angka Inflasi

Manfaat angka inflasi antara lain:

- Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage indexation*).

- Penyesuaian Nilai Kontrak (*contractual payment*).
- Eskalasi Nilai Proyek (*project escalation*).
- Penentuan Target Inflasi (*inflation targeting*).
- Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*).
- Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP Deflator*).
- Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*).
- Indikator dini tingkat bunga, valas dan indeks harga saham.

## **2.5. Sumber Data**

Bahan dasar penyusunan inflasi adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) (*Cost of Living Survey*). SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali, dan kini SBH 2012 menjadi dasar penyusunan IHK sebagai nilai konsumsi tahun dasar. Hasil SBH lainnya yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah Diagram Timbang (*Weighing Diagram*). Data perubahan harga secara periodik dikumpulkan dari survei harga konsumen. Survei harga konsumen dilakukan secara berkala yaitu harian, mingguan, dan bulanan.

## Ulasan

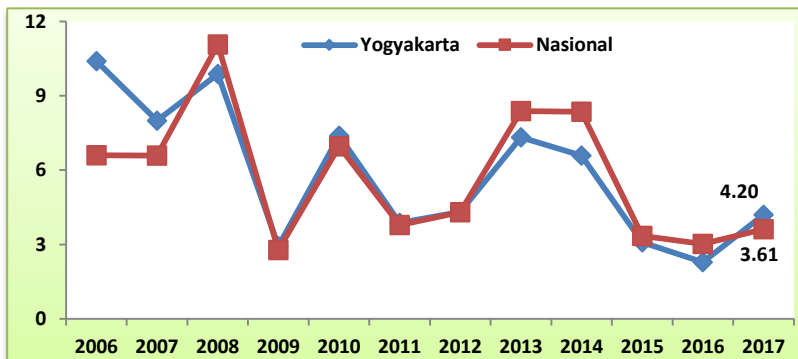
Inflasi merupakan merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Inflasi dapat berdampak pada menurunnya pendapatan riil masyarakat.

Secara berkelanjutan dapat berdampak negatif dalam perekonomian makro (Agus Budi Santoso; 2017).

Inflasi tahun 2017 Kota Yogyakarta melampaui Inflasi Nasional

Data Inflasi menunjukkan hingga bulan September 2018, inflasi kota Yogyakarta selalu lebih rendah daripada inflasi nasional, kecuali pada bulan Juli. Sementara itu tercatat ada 3 bulan diantaranya mengalami deflasi. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2018, yakni 0,26. Deflasi tersebut ditunjukkan oleh penurunan beberapa indeks harga konsumen seperti kelompok bahan makanan sebesar 0,99 persen, kelompok sandang 0,10 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan turun 1,29 persen.

**Gambar 2.1**  
**Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional**  
**2006-2017**



Selanjutnya, inflasi *year on year* Kota Yogyakarta tahun 2017 tercatat lebih tinggi 0,59 poin daripada Nasional. Bahkan inflasi 2017 adalah yang tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir dan mencapai 4,20. Meskipun masih tergolong ringan, kenaikan inflasi hampir 2 kali lipat dibanding tahun 2016 sehingga hal ini patut mendapat perhatian serius.

Bila ditinjau menurut Kota-kota di Pulau Jawa, Inflasi Kota Serang adalah yang tertinggi dibandingkan lima ibukota provinsi lainnya di Pulau Jawa dalam empat tahun terakhir. Meski menunjukkan tren yang menurun setiap tahun, tetapi semua inflasi di ibukota provinsi tersebut meningkat hingga inflasi Kota Serang tahun 2017 masih mencapai 5,17 persen. Beberapa kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM disinyalir menyebabkan kenaikan inflasi di semua ibukota provinsi, bahkan telah melampaui angka inflasi nasional.

**Tabel 2.1**  
**Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional,**  
**2017– 2018 (2012=100)**

Bulan	Yogyakarta		Nasional	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	1,24	0,55	0,97	0,62
Februari	0,36	-0,05	0,23	0,17
Maret	-0,06	0,15	-0,02	0,20
April	0,28	0,10	0,09	0,10
Mei	0,33	0,08	0,39	0,21
Juni	0,61	0,46	0,69	0,59
Juli	0,43	0,56	0,22	0,28
Agustus	-0,45	-0,26	-0,07	-0,05
September	0,13	-0,11	0,13	-0,18
Oktober	0,16	.....	0,01	.....
November	0,20	.....	0,20	.....
Desember	0,90	.....	0,71	.....

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta dan BPS RI

**Tabel 2.2**  
**Inflasi Bulan Desember 2017 dan *Year on Year***  
**Menurut Kelompok Pengeluaran**

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Bulan Desember (%)		Inflasi <i>Year on Year</i> (%)	
	Yogyakarta	Nasional	Yogyakarta	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Umum</b>	<b>0,90</b>	<b>0,71</b>	<b>4,20</b>	<b>3,61</b>
1. Bahan Makanan	3,56	2,26	2,71	1,26
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,13	0,30	2,79	4,10
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0,02	0,17	5,63	5,14
4. Sandang	0,07	0,13	3,84	3,92
5. Kesehatan	-0,02	0,18	2,76	2,99
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	0,04	0,07	2,81	3,33
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,22	0,75	6,72	4,23

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta dan BPS RI

**Tabel 2.3**  
**Andil Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Bulan Desember 2017**  
**(2012=100)**

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (%)	
	Yogyakarta	Nasional
(1)	(2)	(3)
UMUM	0,90	0,71
1. Bahan Makanan	0,66	0,46
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,02	0,05
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0,01	0,04
4. Sandang	0,01	0,01
5. Kesehatan	0,00	0,01
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	0,00	0,00
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,20	0,14

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta dan BPS RI

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Inflasi Tahun ke Tahun Kota Yogyakarta dan Nasional, 2006-2017**

Tahun	Yogyakarta	Nasional
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
2017	4,20	3,61
2016	2,29	3,02
2015	3,09	3,35
2014	6,59	8,36
2013	7,32	8,38
2012	4,31	4,30
2011	3,88	3,79
2010	7,38	6,96
2009	2,93	2,78
2008	9,88	11,06
2007	7,99	6,59
2006	10,40	6,60

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta dan BPS RI

Ket./Note : Tahun dasar 1998 – 2003 (1996=100)

Tahun dasar 2004 – 2007 (2002=100)

Tahun dasar 2008-2013 (2007=100)

Mulai Tahun dasar 2014 (2012=100)

**Tabel 2.5**  
**Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi**  
**Bulan Desember 2016-2017 untuk 23 Kota-kota Besar di**  
**Pulau Jawa**

No.	Kota	2016		2017	
		IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>126,27</b>	<b>0,27</b>	<b>130,97</b>	<b>0,65</b>
2	Bogor	126,07	0,16	131,86	0,43
3	Sukabumi	125,09	0,45	130,22	0,58
<b>4</b>	<b>Bandung</b>	<b>125,28</b>	<b>0,63</b>	<b>129,61</b>	<b>0,73</b>
5	Cirebon	121,16	0,06	126,44	0,56
6	Bekasi	123,07	0,27	126,77	0,42
7	Depok	124,35	0,18	129,24	0,61
8	Tasikmalaya	124,43	0,48	129,26	0,51
9	Cilacap	127,81	0,09	133,45	0,60
10	Purwokerto	123,23	0,37	128,05	0,57
11	Kudus	131,20	0,30	136,67	0,60
12	Surakarta	122,41	0,30	126,21	1,10
<b>13</b>	<b>Semarang</b>	<b>124,59</b>	<b>0,20</b>	<b>129,13</b>	<b>0,68</b>
14	Tegal	122,49	-0,09	127,43	0,49
<b>15</b>	<b>Yogyakarta</b>	<b>123,21</b>	<b>0,35</b>	<b>128,39</b>	<b>0,90</b>
16	Jember	122,56	0,93	126,88	0,66
17	Banyuwangi	122,50	0,47	126,38	0,60
18	Sumenep	123,01	0,53	127,19	0,43
19	Kediri	122,56	0,36	126,77	0,43
20	Malang	126,35	0,58	131,09	0,49
21	Probolinggo	123,08	0,38	127,00	0,49
22	Madiun	122,74	0,45	128,61	0,47
<b>23</b>	<b>Surabaya</b>	<b>125,77</b>	<b>0,56</b>	<b>131,26</b>	<b>0,85</b>
24	Tangerang	133,61	0,66	138,29	0,80
<b>25</b>	<b>Serang</b>	<b>133,02</b>	<b>0,12</b>	<b>139,90</b>	<b>0,42</b>
26	Cilegon	130,99	0,94	137,85	0,46
	Nasional	<b>126,71</b>	<b>0,42</b>	<b>131,28</b>	<b>0,71</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS RI

**Tabel 2.6**  
**Laju Inflasi Tahun Kalender untuk Kota-kota Besar di Pulau Jawa,**  
**2013-2017**

<b>No.</b>	<b>Kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>DKI Jakarta</b>	<b>8,00</b>	<b>8,95</b>	<b>3,30</b>	<b>2,37</b>	<b>3,72</b>
2	Bogor	8,55	6,83	2,70	3,60	4,59
3	Sukabumi	8,03	8,38	2,20	2,57	4,10
4	<b>Bandung</b>	<b>7,97</b>	<b>7,76</b>	<b>3,93</b>	<b>2,93</b>	<b>3,46</b>
5	Cirebon	7,86	7,08	1,56	1,87	4,36
6	Bekasi	9,46	7,68	2,22	2,47	3,01
7	Depok	10,97	7,49	1,87	2,60	3,93
8	Tasikmalaya	6,89	8,09	3,53	2,75	3,88
9	Cilacap	NA	8,19	2,63	2,77	4,41
10	Purwokerto	8,50	7,09	2,52	2,42	3,91
11	Kudus	NA	8,59	3,28	2,32	4,17
12	Surakarta	8,32	8,01	2,56	2,15	3,10
13	<b>Semarang</b>	<b>8,19</b>	<b>8,53</b>	<b>2,56</b>	<b>2,32</b>	<b>3,64</b>
14	Tegal	5,80	7,40	3,95	2,71	4,03
15	<b>Yogyakarta</b>	<b>7,32</b>	<b>6,59</b>	<b>3,09</b>	<b>2,29</b>	<b>4,20</b>
16	Jember	7,21	7,52	2,31	1,73	3,52
17	Banyuwangi	NA	6,59	2,15	1,91	3,17
18	Sumenep	6,62	8,04	2,62	2,19	3,40
19	Kediri	8,05	7,49	1,71	1,30	3,44
20	Malang	7,92	8,14	3,32	2,62	3,75
21	Probolinggo	7,98	6,79	2,11	1,53	3,18
22	Madiun	7,52	7,40	2,75	2,25	4,78
23	<b>Surabaya</b>	<b>7,52</b>	<b>7,90</b>	<b>3,43</b>	<b>3,22</b>	<b>4,37</b>
24	Tangerang	10,02	10,03	4,28	2,65	3,50
25	<b>Serang</b>	<b>9,16</b>	<b>11,27</b>	<b>4,67</b>	<b>3,26</b>	<b>5,17</b>
26	Cilegon	7,98	9,93	3,94	4,22	5,24
<b>Nasional</b>		<b>8,38</b>	<b>8,36</b>	<b>3,35</b>	<b>3,02</b>	<b>3,61</b>

Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Yogyakarta 2017

Ket : Data berdasarkan perubahan IHK Desember terhadap Desember tahun sebelumnya

### 3.1. Konsep dan Definisi

**Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu.

**Produk Nasional Bruto (PNB)** atau *Gross Nasional Product* (GNP) adalah PDB ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi neto dari luar negeri (*net factor income from abroad*) (pendapatan faktor produksi dari luar dikurangi dengan pendapatan faktor produksi yang ke luar negeri).

**Pendapatan nasional** (*National Income*) adalah PNB dikurangi dengan pajak tak langsung neto dan penyusutan.

**Penyusunan PDB** menggunakan referensi baku yang disusun oleh *United Nations* dengan judul *A System of National Accounts* (SNA).

### 3.2. Metode Penyusunan PDB/PDRB

Pendekatan Penyusunan PDB/PDRB dalam publikasi ini meliputi:

#### 1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total nilai produksi (*output*) tiap-tiap sektor atau subsector. Tahun dasar 2000, PDB/PDRB pendekatan produksi terbagi menjadi 17 kategori lapangan usaha/sektor ekonomi.

#### 2. Pendekatan Penggunaan (*Pengeluaran/ Expenditure Approach*)

PDB diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Penghitungan dengan pendekatan ini menggunakan rumus:

$$\text{PDB} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{E}-\text{Im})$$

C : Pengeluaran konsumsi rumah tangga

I : Investasi yaitu pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok

G : Pengeluaran konsumsi pemerintah

E-Im : Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

**Harga berlaku** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

**Harga konstan** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

### 3.3. Indikator-Indikator Penting Turunan dari Data PDRB

**PDRB Perkapita** adalah pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu.

**Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*Economy growth*)** dihitung menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga.

**Laju pertumbuhan PDRB :**

$$\text{PDRB}_t : \text{PDRB tahun tertentu} \times \frac{\text{PDRB}_{\text{HB}}}{\text{PDRB}_{\text{HK}}} \times 100\%$$

$\text{PDRB}_{t-1}$  : PDRB tahun sebelumnya

**Distribusi persentase PDRB (*Distribution of GRDP*)** merupakan sumbangan dari setiap lapangan usaha atau penggunaan terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase.

**Indeks perkembangan** diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dikalikan 100.

**Indeks harga implisit** diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 pada

tahun yang sama dikalikan 100.

### 3.4. Manfaat PDB/PDRB

**Distribusi PDRB harga berlaku** menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

**Distribusi PDRB** menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

**PDRB penggunaan atas dasar harga konstan** bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

**PDRB per kapita atas dasar harga berlaku** menunjukkan nilai rata-rata PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai ini belum memperhatikan kesenjangan antar satu/kelompok orang dengan kelompok lainnya.

**PDRB per kapita atas dasar harga konstan** berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

**Pertumbuhan ekonomi atau Laju pertumbuhan PDRB (*Economic growth*)** menunjukkan pertumbuhan barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Indikator ini bermanfaat sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral atau regional.

**Sumber Pertumbuhan (*source of growth*)** menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing *share* sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDB.

**Indeks perkembangan** menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun dasarnya.

**Indeks implisit** menunjukkan tingkat perkembangan harga di level produsen.

### **3.5. Sumber Data**

Susenas, data dari Dinas Pertanian, Survei Tahunan Industri Besar dan Sedang, PDAM, Dinas Kesehatan, dan dinas/instansi terkait lainnya.

## Ulasan

Perekonomian DIY yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp.119.173 Milyar. Selama periode tahun 2017 menunjukkan bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,26 persen dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor konstruksi, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum serta posisi ketiga sektor informasi dan komunikasi.

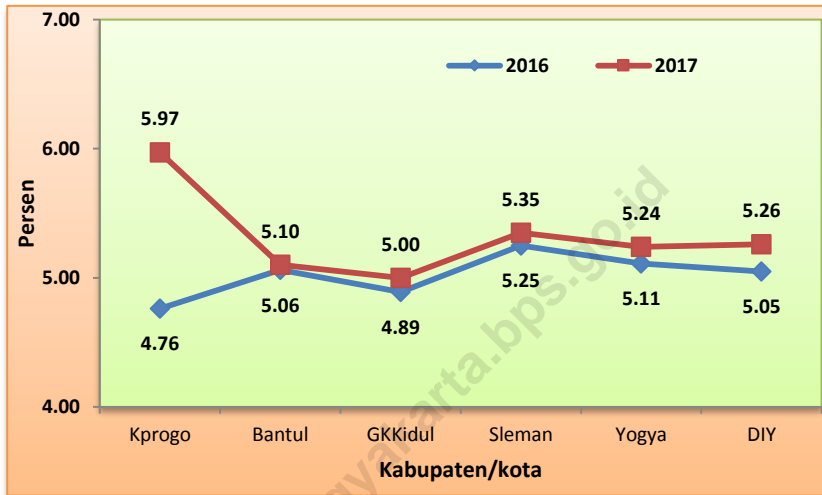
Ekonomi DIY  
Tahun 2017  
tumbuh lebih  
cepat

Membaiknya perekonomian DIY ini juga diikuti oleh perbaikan tingkat kesejahteraan secara global. Pada periode yang sama, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp. 31.677 ribu atau meningkat Rp.2.122 ribu dari tahun sebelumnya. Struktur ekonomi DIY tahun 2017 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan oleh lapangan usaha akomodasi makan minum dan pertanian dengan kontribusi masing-masing sebesar 13,12 persen, 10,32 persen, dan 10,01 persen.

Secara spasial tahun 2017, gambaran perekonomian D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB DIY yaitu 33,64 persen, diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar 26,27 persen. Sementara kontribusi terendah adalah Kabupaten Kulonprogo yakni sebesar 7,60 persen.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Kulonprogo tahun 2017 tumbuh lebih cepat dari kabupaten/kota lain yaitu 5,97 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yakni sebesar 4,76 persen. Prestasi patut diberikan kepada Kabupaten Kulonprogo yang telah menggeser posisi kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir.

**Gambar 3.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/kota**  
**Tahun 2016-2017**



Sementara proksi besaran pendapatan penduduk dengan PDRB perkapita menurut kabupaten/kota tidak berbeda dengan periode sebelumnya. Penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta PDRB perkapitanya masih yang tertinggi dan posisi kedua Kabupaten Sleman. PDRB perkapita Kota Yogyakarta hampir 3 kali lipat daripada PDRB perkapita kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga(68,55%) masih memberikan kontribusi terbesar diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto(31,17%), dan Konsumsi Pemerintah(16,84%). Semua komponen mengalami pertumbuhan.

Selama tiga tahun terakhir, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di posisi terbawah jika dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta masih lebih cepat dibandingkan dengan nasional.

**Tabel 3.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar**  
**Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/kota di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2017 (Miliar Rp)**

Kabupaten/kota	ADHB		ADHK	
	2016*	2017**	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	8 312	9 063	6 581	6 674
Bantul	20 925	22 634	16 378	17 212
Gunungkidul	14 982	16 207	11 697	12 282
Sleman	36 991	40 087	29 574	31 156
Kota Yogyakarta	28 916	31 309	23 538	24 772
<b>DIY</b>	<b>110 009</b>	<b>119 173</b>	<b>87 688</b>	<b>92 301</b>

Sumber : Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

Ket : \* : Angka Sementara \*\* : Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita menurut**  
**Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2016-2017**

Kabupaten/kota	Laju Pertumbuhan (%)		PDRB Per Kapita ADHB (ribu rp)	
	2016*	2017**	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	4,76	5,97	19 949	21 513
Bantul	5,06	5,10	21 280	22 741
Gunungkidul	4,89	5,00	20 737	22 221
Sleman	5,25	5,35	31 292	33 588
Yogyakarta	5,11	5,24	69 171	74 063
<b>DIY</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>29 565</b>	<b>31 677</b>

Sumber : Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

Ket : \* : Angka Sementara \*\* : Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.3**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Daerah Istimewa**  
**Yogyakarta dan Nasional menurut Lapangan Usaha,**  
**2016 – 2017 (persen)**

Lapangan Usaha	D.I. Yogyakarta		Nasional	
	2016*	2017**	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian	10,41	10,01	13,47	13,14
B. Penggalian	0,54	0,52	7,18	7,57
C. Industri Pengolahan	13,21	13,12	20,51	20,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,15	1,15	1,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,07	0,07
F. Konstruksi	9,34	9,49	10,38	10,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran	8,48	8,59	13,18	13,01
H. Transportasi dan Pergudangan	5,68	5,69	5,20	5,41
I. Akomodasi dan Makan Minum	10,22	10,32	2,93	2,85
J. Informasi dan Komunikasi	8,14	8,21	3,62	3,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,94	3,89	4,19	4,20
L. Real Estate	7,09	7,03	2,82	2,79
M, N. Jasa Perusahaan	1,01	1,01	1,71	1,75
O. Administrasi Pemerintahan	8,23	8,57	3,87	3,70
P. Jasa Pendidikan	8,25	8,15	3,37	3,29
Q. Jasa Kesehatan	2,51	2,52	1,07	1,07
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,57	2,61	1,70	1,76
<b>PDRB/PDB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: : Pendapatan Nasional Indonesia 2013-2017

Ket : \* : Angka Sementara \*\* : Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut**  
**Lapangan Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional,**  
**2016-2017 (persen)**

Lapangan Usaha	D.I. Yogyakarta		Nasional	
	2016*	2017**	2016*	2017**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
A. Pertanian	1,46	1,94	3,36	3,81
B. Penggalian	0,42	3,39	0,95	0,69
C. Industri Pengolahan	5,07	5,74	4,26	4,27
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,26	3,96	5,39	1,54
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,36	3,46	3,60	4,61
F. Konstruksi	5,42	6,94	5,22	6,79
G. Perdagangan Besar dan Eceran	6,09	5,72	4,03	4,44
H. Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,74	7,45	8,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,51	6,21	5,17	5,55
J. Informasi dan Komunikasi	8,32	6,14	8,88	9,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,98	2,80	8,90	5,48
L. Real Estate	5,14	4,94	4,69	3,68
M, N. Jasa Perusahaan	3,43	5,86	7,36	8,44
O. Administrasi Pemerintahan	5,57	4,51	3,19	2,06
P. Jasa Pendidikan	3,07	5,56	3,80	3,66
Q. Jasa Kesehatan	4,52	5,84	5,15	6,79
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,70	5,76	8,02	8,66
<b>PDRB</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>	<b>5,03</b>	<b>5,07</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta

Ket : \* : Angka Sementara    \*\* : Angka Sangat Sementara

**Tabel 3.5**  
**PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta ADHB dan ADHK 2010**  
**menurut Pengeluaran, 2016–2017 (juta Rp)**

Komponen Pengeluaran	ADHB		ADHK	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	74 430	81 688	52 619	55 533
2. Konsumsi LNPRT	3 225	3 756	2 362	2 589
3. Konsumsi Pemerintah	18 442	20 063	12 988	13 385
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	33 429	37 148	23 617	24 792
5. Inventori	1 296	1 368	1 045	1 066
6. Ekspor Luar Negeri	6 493	7 437	4 401	4 809
7. Impor Luar Negeri	5 923	6 541	4 493	4 905
8. Net Ekspor Antar Daerah	(21 384)	(25 747)	(4 852)	(4 968)
<b>PDRB</b>	<b>110 009</b>	<b>119 173</b>	<b>87 688</b>	<b>92 301</b>

Sumber : PDRB DIY menurut pengeluaran (Tahun Dasar 2010), 2013-2017

**Tabel 3.6**  
**Distribusi PDRB DIY ADHB dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY ADHK**  
**2010 menurut Pengeluaran, 2016–2017(persen)**

Komponen Pengeluaran	Distribusi		Laju Pertumbuhan	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,66	68,55	4,83	5,54
2. Konsumsi LNPRT	2,93	3,15	(0,92)	9,61
3. Konsumsi Pemerintah	16,76	16,84	2,11	3,06
4. Pembentukan Modal Tetap	30,39	31,17	5,97	4,97
5. Inventori	1,18	1,15	7,24	2,02
6. Ekspor Luar Negeri	5,90	6,24	(0,35)	9,26
7. Impor Luar Negeri	5,38	5,49	20,48	9,19
8. Net Ekspor Antar Daerah	(19,44)	(21,60)	(15,94)	2,39
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>

Sumber : PDRB DIY menurut pengeluaran (Tahun Dasar 2010), 2013-2017

**Tabel 3.7**  
**Indikator Penting PDRB menurut Provinsi di Pulau Jawa,**  
**2015-2017**

Provinsi		Kontribusi PDRB Terhdp PDRB (Persen)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	PDRB Per kapita ADHB (Ribu Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
DKI	2015	17,07	5,91	195 432
Jakarta	2016*	17,19	5,88	211 784
	2017**	17,43	6,22	232 342
Jawa Barat	2015	13,09	5,05	32 648
	2016*	13,06	5,66	34 883
	2017**	12,92	5,29	37 181
Jawa Tengah	2015	8,68	5,47	29 934
	2016*	8,63	5,27	32 133
	2017**	8,59	5,26	34 650
DIY	2015	0,87	4,95	27 572
	2016*	0,87	5,05	29 565
	2017**	0,86	5,26	31 677
Jawa Timur	2015	14,52	5,44	43 541
	2016*	14,67	5,57	47 539
	2017**	14,61	5,45	51 388
Banten	2015	4,11	5,45	40 091
	2016*	4,09	5,28	42 470
	2017**	4,08	5,71	45 342
Indonesia	2015	100,00	4,88	45 120
	2016*	100,00	5,03	47 957
	2017**	100,00	5,07	51 887

Sumber : PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Ket : \* : Angka Sementara \*\* : Angka Sangat Sementara \*) : data belum ada

**Tabel 3.8**  
**Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, dan**  
**Produk Domestik Bruto per Kapita D. I. Yogyakarta, 2002-2017**

Tahun	PDRB (Milyar Rp)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Perkapita Berlaku (ribu Rp)
	Berlaku	Konstan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002	17 522	14 687	4,50	5 461
2003	19 613	15 360	4,58	6 006
2004	22 024	16 146	5,12	6 643
2005	25 338	16 911	4,73	7 529
2006	29 417	17 536	3,70	8 845
2007	32 917	18 292	4,31	9 798
2008	38 102	19 212	5,03	11 230
2009	41 407	20 064	4,43	12 064
2010	64 679	64 679	4,64	18 653
2011	71 370	68 050	5,21	20 333
2012	77 248	71 702	5,37	21 745
2013	84 925	75 627	5,49	23 624
2014	92 842	79 536	5,16	25 526
2015	101 448	83 474	4,95	27 573
2016	110 009	87 688	5,05	29 589
2017	119 173	92 301	5,26	31 677

Sumber : Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

Ket : \* : Angka Sementara \*\* : Angka Sangat Sementara

Tahun 2000 sd 2009 memakai Tahun Dasar 2000 (2000=100)

Tahun 2010 sd 2016 memakai Tahun Dasar 2010 (2010=100)

#### 4.1. Konsep dan Definisi

**Nilai Tukar Petani (NTP)** sebagai indikator untuk melihat daya beli atau daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian yang dihasilkan dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi oleh petani. Menurut Permendagri No. 54/2010 yang menyebut NTP sebagai indikator kesejahteraan petani pada fokus ekonomi daerah.

#### 4.2. Penghitungan NTP

Penghitungan NTP dimulai dengan menggunakan tahun dasar 1976 dan dilakukan penyempurnaan setiap 5 tahun sekali. Tahun dasar yang dipakai masih tahun dasar 2012. NTP sudah mencakup semua subsektor pertanian, kecuali budidaya ikan hias dan budidaya tanaman hias. NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) dengan indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ). Dimana  $I_t$  adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi pertanian.  $I_b$  adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian.

Rumus yang digunakan dalam penghitungan  $I_t$  dan  $I_b$  adalah formula indeks *Modified Laspeyers* seperti penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada proses penghitungan Inflasi. NTP dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NTP = I_t / I_b \times 100 ;$$

$I_t$  : Indeks harga yang diterima petani

$I_b$  : Indeks harga yang dibayar petani

NTP : Nilai Tukar Petani

Penghitungan  $I_t$ , perkembangan harga yang dipantau adalah harga di level produsen (*farm gate*). penghitungan  $I_b$ , adalah harga di level eceran (konsumen) perdesaan.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk keperluan dalam proses produksi. NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) terhadap indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ), dimana komponen  $I_b$  hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

### 4.3. Interpretasi

Nilai NTP dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Artinya, tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

### 4.4. Kelemahan

Meski telah digunakan banyak pihak sebagai ukuran kesejahteraan

petani, penghitungan NTP masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu:

- NTP hanya berfokus pada rasio antara Indeks Harga yang diterima oleh petani dengan Indeks Harga yang dibayar oleh petani. NTP hanya mencerminkan perubahan dalam tingkat profitabilitas dan taraf hidup petani dari sisi perubahan harga dan bukan pada pendapatan petani. Kesejahteraan ekonomi petani biasanya diukur dengan besar atau kecilnya pendapatan yang diterima oleh petani.
- NTP belum dapat mencerminkan kesejahteraan petani. Kenaikan harga produk pertanian tidak identik dengan peningkatan kesejahteraan petani karena harga yang tinggi justru memberikan indikasi bahwa terjadi kelangkaan suplai atau produksi pertanian (Bappenas & JICA, 2013).

#### **4.5. Manfaat**

Indikator NTP begitu banyak manfaatnya, antara lain:

- Indeks Harga yang Diterima Petani (It), menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks ini sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), menunjukkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan. Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di perdesaan.
- Angka NTP adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan /daya beli petani di perdesaan.
- NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

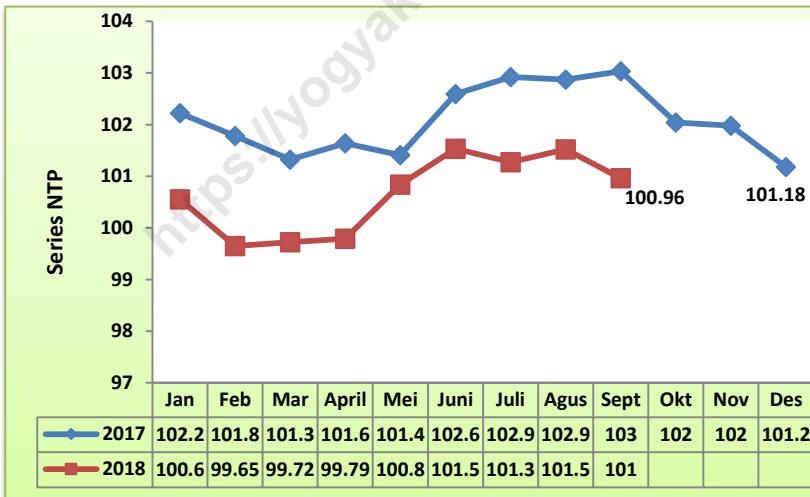
#### **4.6. Sumber Data**

Survei Harga Perdesaan(HKD) dan Survei Konsumen Perdesaan (HD).

## Ulasan

Rata-rata NTP D.I.Yogyakarta sepanjang tahun 2017 sebesar 102,08 sedikit lebih besar dari pada NTP Nasional yang mencapai 101,08. Pada bulan September 2017, petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan/daya beli terhadap tahun 2012 sebesar 3,03 persen. Angka ini adalah yang tertinggi selama tahun 2017. Akan tetapi secara umum, nilai NTP setiap bulan menunjukkan angka yang lebih besar dari 100. Dengan demikian, terjadi kenaikan daya beli di setiap bulan pada periode tahun 2017.

**Gambar 4.1.**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2017-2018**



Sementara itu hingga bulan September 2018, semua nilai NTP 2018 lebih rendah daripada NTP tahun 2017. Artinya tingkat kesejahteraan petani secara umum hingga bulan September 2018 tidak lebih baik daripada di tahun 2018. Namun yang perlu dipahami bahwa ukuran kesejahteraan petani berdasarkan nilai NTP ini hanya membandingkan Indeks Harga yang

diterima oleh petani dari hasil produksi pertanian dengan Indeks Harga yang dibayar oleh petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian.

Ditinjau dari komponen penyusun NTP, tampak bahwa Indeks harga yang diterima petani (It) tertinggi selama periode tahun 2017 adalah pada bulan Agustus yakni mencapai 131,67 persen. Ini berarti tingkat harga hasil produksi petani pada bulan Agustus 2017 mengalami kenaikan secara rata-rata 31,67 persen terhadap produksi pada tahun 2012. Sebaliknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) terendah adalah pada kondisi bulan April yang mencapai 125,97. Hal ini menunjukkan harga barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian pada bulan April 2017 meningkat 25,97 persen.

Pada tahun 2017, NTP subsektor pertanian budidaya perikanan berada di bawah 100, sedangkan subsektor hortikultura, subsektor peternakan, subsektor perikanan dan subsektor perikanan tangkap berada di atas seratus. Sedangkan dua subsektor lainnya bervariasi.

Berdasarkan rata-rata NTP tahun 2017 di provinsi-provinsi Se-Pulau Jawa, Jawa barat merupakan provinsi dengan Nilai NTP tertinggi yakni sebesar 104,93, diikuti oleh provinsi Jawa Timur. Sementara Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan nilai NTP kurang dari 100. Dalam arti bahwa Petani DKI Jakarta pada tahun 2017 mengalami defisit karena kenaikan harga produksi lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi.

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani,**  
**Januari 2017-Desember 2017 (2012=100)**

Bulan	DIY			NASIONAL		
	It	Ib	NTP	It	Ib	NTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	128,89	126,09	102,22	128,00	126,84	100,91
Februari	128,79	126,53	101,78	127,69	127,27	100,33
Maret	127,93	126,26	101,32	127,19	127,25	99,95
April	128,04	125,97	101,64	127,08	127,07	100,01
Mei	129,19	127,40	101,41	128,02	127,82	100,15
Juni	130,69	127,40	102,59	128,78	128,10	100,53
Juli	131,09	127,38	102,92	129,12	128,28	100,65
Agustus	131,67	128,00	102,87	130,31	128,25	101,60
September	131,25	127,39	103,03	130,94	128,10	102,22
Oktober	129,84	127,24	102,04	131,59	128,03	102,78
November	130,18	127,66	101,98	132,34	128,41	103,07
Desember	130,29	128,77	101,18	133,35	129,40	103,06
<b>Rata-rata</b>	<b>129,82</b>	<b>127,17</b>	<b>102,08</b>	<b>129,53</b>	<b>127,90</b>	<b>101,28</b>

Sumber : Statistik Nilai Tukar Petani 2017

**Tabel 4.2**  
**Rata-rata Nilai Tukar Petani(NTP), 2009 – 2017**

<b>Tahun</b>	<b>D.I. YOGYAKARTA</b>	<b>NASIONAL</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
2017	102,08	101,28
2016	104,09	101,65
2015	101,13	101,59
2014	102,26	102,03
2013	116,89	104,91
2012	116,45	105,24
2011	115,11	104,58
2010	107,84	101,78
2009	107,84	99,86

Sumber : Statistik Nilai Tukar Petani 2017

Ket : Tahun dasar 2009-2013 (2007=100)

Tahun dasar mulai tahun 2014 (2012=100)

**Tabel 4.3**  
**Nilai Tukar Petani Subsektor Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**Januari-Desember 2017(2012=100)**

Bulan	Subsektor						
	Pangan	Horti	Kebun Rakyat	Ternak	Perikanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	102,22	100,84	123,41	94,94	101,91	113,83	101,23
02	101,78	103,72	120,63	93,75	102,62	114,70	101,93
03	101,32	101,92	121,16	93,08	102,41	116,87	101,59
04	101,64	102,07	121,52	92,54	101,49	116,90	100,61
05	101,41	101,27	122,44	91,19	100,08	115,87	99,18
06	102,59	100,52	125,69	91,21	101,77	116,95	100,90
07	102,92	100,61	126,37	92,48	101,23	116,74	100,35
08	102,87	101,17	123,48	93,35	101,56	116,80	100,70
09	103,03	101,80	121,90	92,72	102,09	117,28	101,23
10	102,04	100,60	118,66	91,91	101,73	118,40	1100,78
11	101,98	100,88	116,78	92,00	101,20	118,18	100,24
12	101,18	100,15	114,21	91,06	101,78	117,68	100,87
<b>Rata-rata</b>	<b>102,08</b>	<b>101,29</b>	<b>121,34</b>	<b>92,51</b>	<b>101,65</b>	<b>116,69</b>	<b>100,80</b>

Sumber : Statistik Nilai Tukar Petani 2017

**Tabel 4.4**  
**Nilai Tukar Petani menurut Provinsi di Pulau Jawa,**  
**Tahun 2017**

<b>Bulan</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Banten</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>DIY</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Nasional</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
Januari	99,17	103,25	98,97	98,98	102,22	103,12	100,91
Februari	100,33	102,53	97,92	98,02	101,78	101,81	100,33
Maret	98,95	102,37	98,19	97,50	101,32	101,66	99,95
April	99,22	102,87	98,69	97,81	101,64	101,84	100,01
Mei	98,26	103,94	98,86	98,70	101,41	102,16	100,15
Juni	97,49	104,46	100,19	99,55	102,59	103,00	100,53
Juli	97,32	104,48	99,60	100,22	102,92	103,91	100,65
Agustus	97,54	105,37	99,83	101,53	102,87	105,40	101,60
September	97,69	105,98	100,69	102,56	103,03	106,37	102,22
Oktober	97,73	107,36	101,01	102,97	102,04	106,94	102,78
November	98,06	108,02	101,29	103,43	101,98	106,50	103,07
Desember	97,71	108,39	101,54	103,48	101,18	106,44	103,06
<b>Rata- rata</b>	<b>98,29</b>	<b>104,93</b>	<b>99,75</b>	<b>100,40</b>	<b>102,08</b>	<b>104,10</b>	<b>101,28</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik

**Tabel 4.5**  
**Nilai Tukar Usaha Pertanian(NTUP) D.I. Yogyakarta dan Nasional,**  
**2017– 2018 (2012=100)**

Bulan	Yogyakarta		Nasional	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	113,13	111,14	110,14	112,67
Februari	112,65	110,11	109,62	112,11
Maret	111,46	109,97	108,93	111,58
April	111,29	109,30	108,61	111,03
Mei	111,92	110,37	109,15	111,38
Juni	112,82	111,36	109,59	111,51
Juli	112,92	111,32	109,75	111,55
Agustus	112,96	110,93	110,61	112,08
September	112,50	109,81	110,91	112,05
Oktober	111,28	.....	111,26	.....
November	111,38	.....	111,72	.....
Desember	111,50	.....	112,40	.....

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta dan BPS RI

### 5.1. Konsep dan Definisi

**Lahan Sawah** mencakup sawah pengairan, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, sawah rembesan, lebak dan sebagainya yang utamanya digunakan menanam padi.

**Lahan Bukan Sawah** adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah seperti, lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambakdanau, rawa, dan lainnya. Lahan sawah yang sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah, dan masih digunakan untuk usaha pertanian dimasukkan dalam lahan bukan sawah.

**Produksi tanaman pangan** merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas.

**Luas panen** adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Ini termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit sampai dengan 11 persen), mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam.

**Produktivitas** adalah penghitungan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi pada periode satu tahun laporan.

### 5.2. Sumber Data

Data yang digunakan antara lain :

1. Pengumpulan data statistik pertanian (Survei Pertanian: SP) tanaman pangan yang dilakukan setiap bulan. Tujuan survei ini adalah pengumpulan data luas tanaman padi dan luas tanaman palawija.
2. Pengumpulan data produktivitas (Survei Ubinan) yang dilakukan sesuai dengan waktu petani melakukan panen.

## Ulasan

Penggunaan lahan untuk pertanian tahun 2017, terluas ada di Kabupaten Gunungkidul (124 914 ha) dan Kabupaten Kulonprogo ( 45 138 ha). Walaupun demikian, sebanyak 93,70 persen luas lahan di Kabupaten Gunungkidul berasal dari lahan bukan Sawah.

Lahan pertanian terluas ada di Kabupaten Gunungkidul

Di sisi lain, sebanyak 97,66 persen atau 3.170 hektar lahan di Kota Yogyakarta digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Hanya 2,46 persen (80 hektar) lahan di Kota Yogyakarta yang digunakan sebagai lahan pertanian.

Persentase penggunaan lahan untuk pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta selama empat tahun terakhir menurun dari tahun ke tahun. Ini diduga karena semakin maraknya pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

Tahun 2017, produksi ubi kayu masih mempunyai peranan yang terbesar terhadap produksi tanaman pangan di D.I. Yogyakarta. Produksinya mampu mencapai yaitu 1 025 641 ton. Sedangkan produk makanan pokok sebagian besar penduduk D.I. Yogyakarta komoditas padi mampu menghasilkan 55,48 kuintal per ha sehingga produksi padi pada tahun tersebut hanya mencapai 881,106 ton atau menurun dibandingkan tahun 2016.

**Tabel 5.1**  
**Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian menurut**  
**Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 (ha)**

Kabupaten/kota	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	10 254	34 884	13 489	58 627
Bantul	15 162	13 641	21 882	50 685
Gunungkidul	7 863	117 051	23 622	148 536
Sleman	19 131	19 978	18 373	57 482
Yogyakarta	64	16	3 170	3 250
<b>DIY</b>	<b>52 474</b>	<b>165 570</b>	<b>80 536</b>	<b>318 580</b>

Sumber: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2018

**Tabel 5.2**  
**Persentase Penggunaan Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017**

<b>Penggunaan Lahan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Lahan Pertanian	75,07	76,26	76,04	75,68	74,72
Lahan Sawah	17,74	17,47	17,40	17,36	16,47
Berpengairan	14,79	14,53	14,43	14,40	13,46
Tadah Hujan	2,95	2,93	2,97	2,95	3,01
Bukan lahan Sawah	57,32	58,79	58,64	58,33	58,25
Tegal/Kebun	30,55	32,82	32,58	32,55	32,37
Sementara Tidak Diusahakan	0,30	0,29	0,28	0,28	0,75
Hutan Rakyat	-	-	-	-	-
Perkebunan	-	-	-	-	-
Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)	26,48	25,68	25,79	25,50	25,14
Lahan Bukan Pertanian	24,93	23,74	23,96	24,32	25,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

**Tabel 5.3**  
**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi\*)**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Luas Panen (ha)</b>	<b>Produktivitas (ku/ha)</b>	<b>Produksi (ton)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2013	159 266	57,88	921 824
2014	158 903	57,87	919 573
2015	155 838	62,57	975 136
2016	158 132	55,82	882 702
2017	158 818	55,48	881 106

Sumber : Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

Catatan: \*)Padi sawah dan padi ladang

**Tabel 5.4**  
**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Luas Panen (ha)</b>	<b>Produktivitas (ku/ha)</b>	<b>Produksi(ton)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2013	70 722	40,95	289 580
2014	67 657	46,15	312 236
2015	65 485	45,67	299 084
2016	65 632	47,27	310 257
2017	62 521	49,86	311 764

Sumber: Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

**Tabel 5.5**  
**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Luas Panen (ha)</b>	<b>Produktivitas (ku/ha)</b>	<b>Produksi (ton)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2013	23 290	13,60	31 677
2014	16 337	11,98	19 579
2015	13 886	13,55	18 822
2016	12 990	12,90	16 763
2017	6 533	13,25	8 656

Sumber: Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

**Tabel 5.6**  
**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Luas Panen (ha)</b>	<b>Produktivitas (ku/ha)</b>	<b>Produksi (ton)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2013	67 532	10,60	71 582
2014	70 888	11,75	83 300
2015	60 725	10,36	62 901
2016	68 945	11,00	75 816
2017	68 083	11,74	79 907

Sumber: Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

**Tabel 5.7**  
**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017**

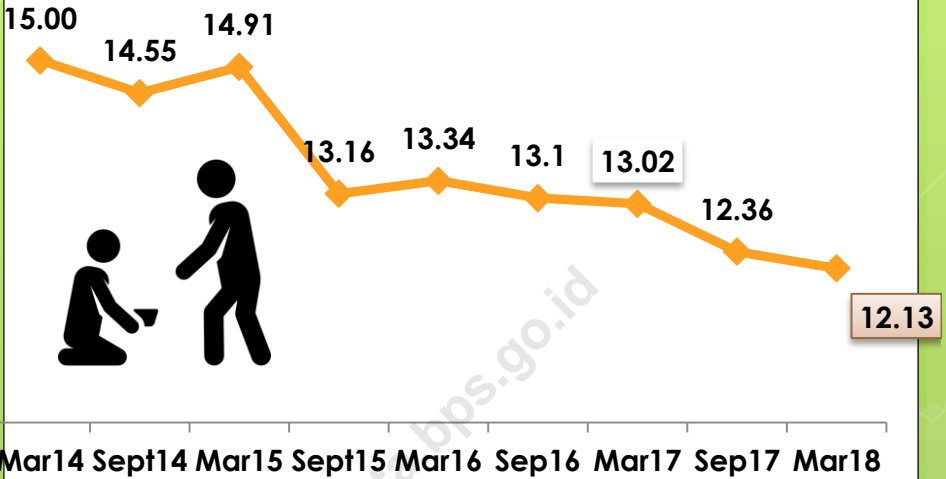
<b>Tahun</b>	<b>Luas Panen (ha)</b>	<b>Produktivitas (ku/ha)</b>	<b>Produksi (ton)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2013	58 777	172,44	1 013 565
2014	56 120	157,69	884 931
2015	55 626	157,01	873 362
2016	52 850	212,94	1 125 375
2017	54 201	189,23	1 025 641

Sumber: Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

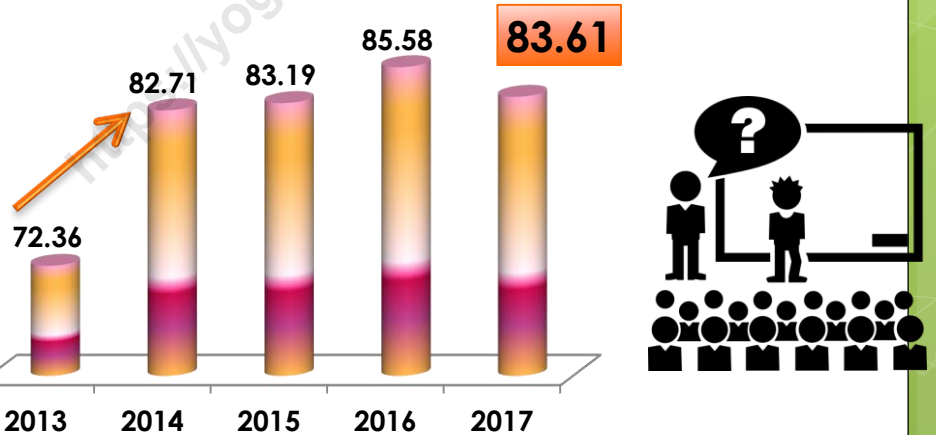


# Indikator Sosial

## Angka Kemiskinan



## INDEKS DEMORASI INDONESIA



Kesejahteraan meningkat dan Pembangunan demokrasi cenderung membaik



### 6.1. Konsep dan Definisi

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labor Organization* (ILO). Dalam konsep ketenagakerjaan, populasi terbagi menjadi dua yaitu:

1. Penduduk Usia kerja/usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
2. Bukan usia kerja/usia non produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun.

**Angkatan Kerja (*Labor Force*)** adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur.



**Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke

atas) yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya.

**Bekerja** adalah kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi, punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya.

**Penganggur terbuka** (*open unemployment*) adalah mereka mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT/ *Unemployment Rate*)** adalah rasio jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

**Pekerja Tidak Penuh** adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal(kurang dari 35 jam seminggu) (dahulu setengah pengangguran terpaksa).

**Setengah Penganggur (*Underemployment*)** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan

$$\text{Tingkat setengah pengangguran} = \frac{A}{AK} \times 100$$

A : Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal

AK : Jumlah angkatan kerja

**Pekerja Paruh Waktu**((*Part time worker*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain(dulu pengangguran sukarela).

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK/*Labor Force Participation Rate*)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

**Jumlah Jam Kerja** adalah jumlah jam kerja seluruhnya yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

**Lapangan Usaha;** Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Dalam pengumpulan datanya menggunakan 18 kategori tetapi dalam penyajian/publikasinya menggunakan 9 kategori/sector yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas, dan Air;
5. Bangunan;
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel;
7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi;
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa Kemasyarakatan.

### **Status Pekerjaan**

Status pekerjaan adalah status kegiatan usaha seseorang yang sedang bekerja, meliputi:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

**Kegiatan formal dan informal** secara sederhana dapat didefinisikan berdasarkan status pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk yang bekerja di sektor informal.

## **6.2. Manfaat**

1. Indikator angkatan kerja bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.
2. Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran (*underemployment*) bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan dan produktivitas pekerja.
3. Indikator TPAK untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
4. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja.
5. Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat

pembangunan suatu negara. Untuk melihat pergeseran pekerjaan menurut sektor pekerjaan, status pekerjaan.

6. Indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja).

### **6.3. Interpertasi**

1. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.
2. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat *utilisasi* pekerja dan produktivitasnya. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan, dan tidak tersedianya jaminan sosial.
3. Semakin tinggi TPAK menunjukkan besarnya bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.
4. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Semakin rendah angka pengangguran terbuka, semakin stabil kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat.

### **6.4. Sumber Data:**

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

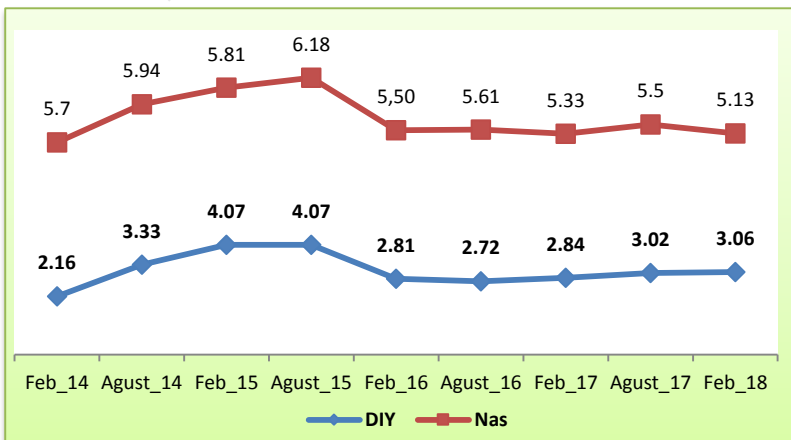
## Ulasan

Indikator ketenagakerjaan selama periode Februari 2014 sampai Februari 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun setiap tahun.

TPT DIY  
2014-2018  
lebih rendah  
dari Nasional

Sebaliknya Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meskipun juga berfluktuatif setiap tahun namun memperlihatkan tren meningkat setiap tahun. Periode Februari 2018 nilai TPT dan TPAC masing-masing sebesar 3,06 persen dan 63,87 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia kerja pada kondisi bulan Februari 2018 hanya sekitar 64 orang yang termasuk angkatan kerja. Secara nominal dapat dikatakan bahwa dari 2.142,05 ribu yang ikut aktif di pasar tenaga kerja atau memilih untuk ikut terjun di angkatan kerja, hampir 65,60 ribu orang diantaranya masih menjadi penganggur.

**Gambar 6.1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014-2018**



Selanjutnya, untuk rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2018 tercatat sebesar 96,94 persen. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada Februari 2018 dari 100 penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sekitar 97 orang yang bekerja. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2017 yang turun sebesar 0,22 poin.

Komposisi jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada Februari 2018 masih mempunyai pola yang sama dengan keadaan Februari 2017. Pada kedua periode tersebut, masih didominasi oleh sektor perdagangan diikuti sektor pertanian dan sektor jasa-jasa.

Namun demikian, presentase penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan pada keadaan Februari 2017-Februari 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,19 poin, sedangkan sektor pertanian dan sektor jasa-jasa mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,28 poin dan 2,76 poin.

Kondisi yang sama juga pada distribusi presentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama. Berdasarkan tabel 6.3, mayoritas penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai (44,32 persen), diikuti dengan penduduk yang berusaha dibantu art/buruh tak tetap (16,54 persen), dan berusaha sendiri (14,99 persen). Khusus untuk penduduk yang bekerja pada kegiatan formal pada periode Februari 2017-Februari 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 0,52 poin, sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal justru mengalami penurunan.

Menurut Kabupaten/kota, selama periode Agustus 2012 sampai Agustus 2017, Kabupaten Gunungkidul selalu mempunyai TPT terendah, dan tertinggi di Kota Yogyakarta kecuali Tahun 2012. Periode Agustus 2017, TPT Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta masing-masing sebesar 1,65 persen dan 5,08 persen. Perbedaan yang cukup tinggi tersebut disinyalir karena penduduk Kabupaten Gunungkidul tidak memperhatikan jenis

pekerjaan berdasarkan ijazah yang dimiliki.

Sementara TPAK menurut kabupaten/kota tahun 2017 hampir sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Antara tahun 2015-2017, TPAK tertinggi di Kabupaten Kulonprogo dan terendah adalah di Kota Yogyakarta. Fenomena ini memberikan informasi bahwa penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kota Yogyakarta lebih sedikit yang memilih untuk terjun di angkatan kerja. Mereka kemungkinan lebih memilih untuk melanjutkan sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Gambaran keadaan ketenagakerjaan di Pulau Jawa memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, TPAK D.I. Yogyakarta masih yang paling tinggi. Sebaliknya TPT D.I. Yogyakarta menjadi yang terendah. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa meskipun penduduk yang terjun di pasar kerja cukup tinggi namun persentase mereka yang masih menganggur cukup rendah.

**Tabel 6.1**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2018(ribu)**

Jenis Kegiatan	2016		2017		2018
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bekerja	2 037,86	2 042,40	2 055,89	2 053,17	2 076,44
Pengangguran	59,00	57,04	60,08	64,02	65,60
Angkatan Kerja	2 096,86	2 099,44	2 115,97	2 117,19	2 142,05
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,20	71,96	72,00	71,52	72,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,81	2,72	2,84	3,02	3,06
Setengah Penganggur	92,09	106,32	113,16	90,34	107,52
Paruh waktu	415,24	446,89	481,95	443,34	501,82
Total Setengah Penganggur	507,32	553,21	595,11	533,68	609,34

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

**Tabel 6.2**  
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja**  
**Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama**  
**di Daerah istimewa Yogyakarta, 2016-2018**

Lapangan Pekerjaan	2016		2017		2018
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	22,81	23,27	22,50	22,01	20,22
Industri Pengolahan	17,85	12,83	16,06	15,83	19,25
Konstruksi	8,53	6,55	6,72	7,47	5,58
Perdagangan, Hotel dan Restoran	26,59	28,89	25,54	26,97	25,75
Pengangkutan dan Komunikasi	2,35	3,68	2,73	3,61	4,45
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,61	2,78	4,11	3,84	4,90
Jasa-jasa	18,39	20,75	21,31	19,37	18,55
Lainnya (Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air Minum)	0,87	1,25	1,03	0,91	1,30
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi D.I. Yogyakarta 2017-2018

**Tabel 6.3**  
**Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja**  
**Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2018**

Status Pekerjaan	2016		2017		2018
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	14,15	15,35	12,35	15,35	14,99
Berusaha dibantu art/buruh tidak tetap	19,49	18,84	18,19	18,83	16,54
Berusaha dibantu buruh tetap	3,52	3,51	4,90	3,51	4,08
Buruh/Karyawan/Pegawai	38,11	41,58	42,98	41,58	44,32
Pekerja bebas	11,44	8,19	8,01	8,19	7,00
Pekerja Keluarga/tak dibayar	13,29	12,53	13,57	12,54	13,07
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pada Kegiatan Formal	41,63	45,09	47,88	45,99	48,40
Persentase pada Kegiatan InFormal	58,37	54,91	52,12	54,01	51,60

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi D.I. Yogyakarta 2017-2018

**Tabel 6.4**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat**  
**Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah Istimewa Yogyakarta dan**  
**Nasional, 2014-2018**

Tahun	TPAK		TPT		
	DIY	Nasional	DIY	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2014	Februari	71,84	69,17	2,16	5,70
	Agustus	71,05	66,60	3,33	5,94
2015	Februari	73,10	69,50	4,07	5,81
	Agustus	68,38	65,76	4,07	6,18
2016	Februari	72,20	68,06	2,81	5,50
	Agustus	71,96	66,34	2,72	5,61
2017	Februari	72,00	69,02	2,84	5,33
	Agustus	62,69	66,67	3,02	5,50
2018	Februari	63,87	69,20	3,06	5,13

Sumber: Berita Resmi Statistik

**Tabel 6.5**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2017(persen)**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	75,40	75,61	82,33	75,62	74,61
Bantul	71,26	66,78	74,26	67,84	72,21
Gunungkidul	80,43	77,87	83,57	70,77	74,50
TPAK Sleman	66,44	65,67	76,55	65,45	70,17
Yogyakarta	67,28	64,38	81,02	66,70	65,72
DIY	71,52	69,29	71,05	68,38	71,52
Nasional	67,88	66,77	66,60	65,76	66,67
Kulonprogo	3,04	2,85	2,88	3,72	1,99
Bantul	3,70	3,36	2,57	3,00	3,12
Gunungkidul	1,38	1,69	1,61	2,90	1,65
TPT Sleman	5,64	3,28	4,21	5,37	3,51
Yogyakarta	5,33	6,45	6,35	5,52	5,08
DIY	3,86	3,24	3,33	4,07	3,02
Nasional	6,13	6,17	5,94	6,18	5,50

Sumber : BPS

**Tabel 6.6**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) dan Tingkat**  
**Pengangguran Terbuka(TPT) menurut Provinsi di Pulau Jawa,**  
**2017 – 2018 (persen)**

Provinsi	TPAK			TPT		
	2017 Feb	2017 Agust	2018 Feb	2017 Feb	2017 Agust	2018 Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	66,91	61,97	69,27	5,36	7,14	5,34
Jawa Barat	60,65	63,34	63,82	8,49	8,22	8,16
Jawa Tengah	67,15	69,11	69,58	4,15	4,57	4,23
DIY	71,96	71,52	72,21	2,84	3,02	3,06
Jawa Timur	66,14	68,78	68,71	4,10	4,00	3,85
Banten	63,66	62,32	67,06	7,75	9,28	7,77
Indonesia	66,34	66,67	67,18	5,33	5,50	5,13

Sumber : BPS RI

## 7.1. Konsep dan Definisi

### 7.1.1. Kemiskinan

**Kemiskinan** didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. **Kemiskinan** dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

**Penduduk miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK)/ *poverty line* yaitu garis yang setara dengan nilai pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*)

**Garis kemiskinan(GK)** adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penghitungan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

### Penghitungan Garis Kemiskinan (GK)

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

**Tahap pertama** adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas GK. GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

**GKM** adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 jenis komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilo kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori.

**Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM)** adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

**Garis Kemiskinan** merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

### **Penghitungan indikator kemiskinan**

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

$$\alpha = 0, 1, 2$$

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

Jika  $\alpha=0$ , diperoleh *Head Count Index* ( $P_0$ ), jika  $\alpha=1$  diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- $P_1$ ) dan jika  $\alpha=2$  disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- $P_2$ ).

### Interpretasi

- a. **Head Count Index (HCI- $P_0$ )**, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index- $P_1$ )** adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index- $P_2$ )** adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
- d. **Garis kemiskinan (Poverty Line)** menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

### 7.1.2. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus

koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

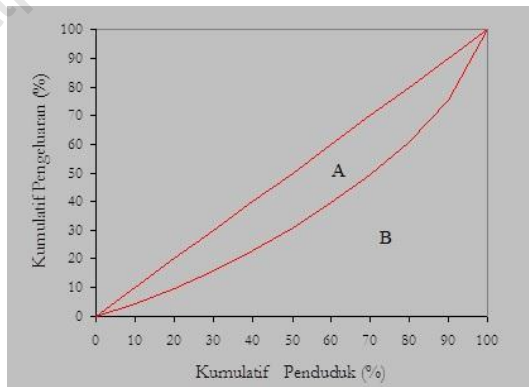
G : Koefisien Gini

$X_k$  : Proporsi kumulatif dari penduduk untuk  $k = 0,1,2,\dots,n$ , dengan  $X_0 = 0$  dan  $X_1 = 1$

$Y_k$  : Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk  $k = 0,1,2,\dots,n$ , dengan  $Y_0 = 0$  dan  $Y_1 = 1$

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

**Gambar 7.1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorentz**



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz. Koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari kelompok termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif

pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Koefisien Gini didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ , dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika  $A=0$  koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika  $B=0$  koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

### **7.1.3. Ukuran Bank Dunia**

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- b). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.
- c). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

### **7.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi

Nasional) Kor dan Modul Konsumsi. Sebagai informasi tambahan, digunakan pula hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

### **Level Penyajian**

Nasional dan provinsi, angka kemiskinan disajikan menurut wilayah perkotaan dan pedesaan. Sedangkan kabupaten/kota tidak dibedakan menurut wilayah perkotaan dan pedesaan.

### **Kelemahan**

Data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program bantuan langsung.

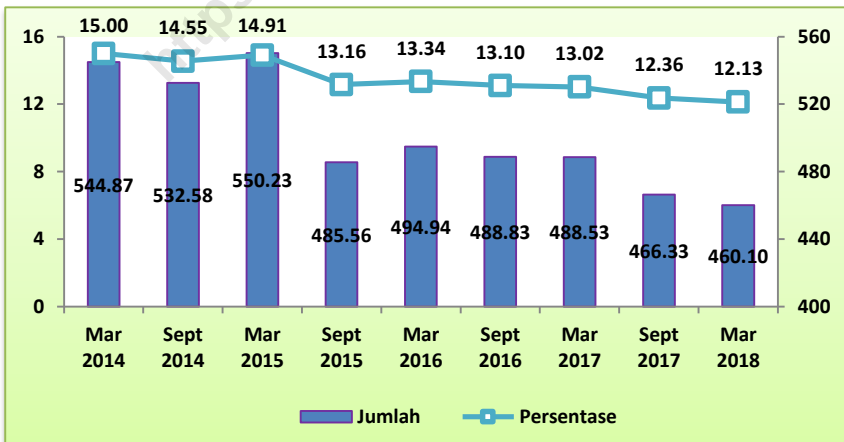
## Ulasan

Persentase dan jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun setiap tahun. Pada periode Maret 2018, Presentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta sebesar 12,13 persen atau menurun 0,89 persen poin dibanding Maret 2017 yang sebesar 13,02 persen. Sementara secara nominal, jumlah penduduk pada periode yang sama sebesar 460,10 ribu orang dan menurun 28,43 ribu orang.

Tingkat Kemiskinan DIY tertinggi se-Pulau Jawa

Bila ditinjau dari penurunan kemiskinan pada periode tahun 2014-2018, angka kemiskinan secara rata-rata mampu turun sebesar 0,72 persen pertahun. Dengan demikian untuk mencapai kemiskinan satu digit membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun kemudian.

**Gambar 7.2.**  
**Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin D.I. Yogyakarta, 2014-2018**



Menurut tipe daerah, tampak terjadi disparitas yang cukup tinggi. Disparitas angka kemiskinan perkotaan dan perdesaan mencapai range

antara 3 hingga 4 persen. Periode Maret 2018, angka kemiskinan perdesaan masih mencapai 15,12 persen sementara angka kemiskinan perkotaan sebesar 11,03 persen. Terjadi perbedaan 4,09 persen poin.

Sebenarnya berbicara tentang kemiskinan makro tak lepas dari besaran garis kemiskinan. Tidak berbeda dengan provinsi lainnya, garis kemiskinan mempunyai pola semakin meningkat setiap tahun. Hanya, pada Maret 2018 ini, garis kemiskinan naik 9,55 persen dari periode tahun sebelumnya. Garis kemiskinan naik jauh lebih cepat dari periode-periode sebelumnya, yaitu hanya berkisar antara 5-7 persen.

Sementara komodite beras dan rokok filter masih menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Tak dapat dipungkiri, mengawal stabilitas harga komodite penyumbang garis kemiskinan akan membantu memperlambat laju pertumbuhan garis kemiskinan.

Profil kemiskinan akan lebih akurat bila ditinjau dari kualitas kemiskinan. Indikator ini ditunjukkan melalui nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan(P2). Data menunjukkan P1 di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Sementara pergerakan angka P1 dan P2 antar periode tidak jauh berbeda. Pada Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan daerah Perdesaan 2,48 atau lebih tinggi 0,57 poin daripada di daerah perkotaan. Namun demikian, P1 perdesaan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan September 2017, sedangkan di perkotaan meningkat. Artinya, meskipun penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan membutuhkan biaya yang lebih besar, akan tetapi jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin perdesaan dengan garis kemiskinan pada Maret 2018 relatif lebih dekat daripada pada September 2017.

Menurut perkembangannya, ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama periode Maret 2014-Maret 2018 berfluktuatif baik di wilayah

perkotaan maupun perdesaan. Seperti pada kondisi Maret 2018, tampak bahwa Setelah mengalami kenaikan cukup tinggi di bulan Maret 2015 namun P2 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit setiap tahun.

Data Kabupaten/kota terlihat presentase penduduk miskin Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2017 masih di posisi tertinggi Se-Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta diikuti oleh kabupaten Gunungkidul yaitu 20,03 persen dan 18,65 persen. Sementara persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sudah satu digit yakni 8,13 persen dan 7,64 persen. Nampaknya kesenjangan persentase penduduk miskin terjadi diantara kabupaten/kota.

Dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau jawa, angka kemiskinan D.I. Yogyakarta hingga saat ini masih yang tertinggi dan bahkan lebih tinggi dari angka nasional. Akan tetapi kualitas pengentasan kemiskinan lebih baik. Indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan adalah yang terkecil. Ini berarti upaya pengentasan kemiskinan memerlukan modal yang lebih ringan dan kesenjangan kesejahteraan diantara penduduk miskin lebih sempit.

**Tabel 7.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah**  
**2014-2018(ribuan jiwa)**

Tahun	D.I. Yogyakarta(ribu orang)			Indonesia(juta orang)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2014	333,03	211,84	544,87	10,51	17,77	28 28
September 2014	324,43	208,15	532,58	10,36	17,37	27 73
Maret 2015	329,65	220,57	550,23	10,65	17,94	28 59
September 2015	292,64	192,92	485,56	10,62	17,89	28 51
Maret 2016	297,71	197,23	494,94	10,34	17,67	28 01
September 2016	301,25	187,58	488,83	10,49	17,28	27 76
Maret 2017	309,03	179,51	488,53	10,67	17,10	27,77
September 2017	298,39	167,94	466,33	10,27	16,31	26,58
Maret 2018	305,24	154,86	460,10	10,14	15,81	59,95

Sumber : Berita Resmi Statistik

**Tabel 7.2**  
**Persentase Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018 (persen)**

Tahun	D.I. Yogyakarta			Indonesia		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2014	13,81	17,36	15,00	8,34	14,17	11,25
September 2014	13,36	16,88	14,55	8,16	13,76	10,96
Maret 2015	13,43	17,85	14,91	8,29	14,21	11,22
September 2015	11,93	15,62	13,16	8,22	14,09	11,13
Maret 2016	11,79	16,63	13,34	7,79	14,11	10,86
September 2016	11,68	16,27	13,10	7,73	13,96	10,70
Maret 2017	11,72	16,11	13,02	7,72	13,93	10,64
September 2017	11,00	15,86	12,36	7,26	13,47	10,12
Maret 2018	11,03	15,12	12,13	7,02	13,20	9,82

Sumber : Berita Resmi Statistik

**Tabel 7.3**  
**Garis Kemiskinan menurut Tipe Daerah di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018 (rupiah/kapita/bulan)**

Tahun	D.I. Yogyakarta			Indonesia		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2014	327 273	286 137	313 452	318 514	286 097	302 735
September 2014	333 561	296 429	321 056	326 853	296 681	312 328
Maret 2015	347 787	312 249	335 886	342 541	317 881	330 776
September 2015	359 470	324 386	347 721	356 378	333 034	344 809
Maret 2016	364 786	331 308	354 084	364 527	343 647	354 386
September 2016	370 510	337 230	360 169	372 114	350 420	361 990
Maret 2017	385 308	348 061	374 009	385 621	361 496	374 478
September 2017	413 631	452 861	396 271	400 995	370 910	387 160
Maret 2018	426 580	366 256	409 744	415 614	383 908	401 220

Sumber : Berita Resmi Statistik

**Tabel 7.4**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) menurut Tipe Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018**

Tahun	D.I. Yogyakarta			Indonesia		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2014	2,22	2,11	2,19	1,25	2,26	1,75
September 2014	2,03	2,98	2,35	1,26	2,25	1,75
Maret 2015	2,55	3,70	2,93	1,40	2,55	1,97
September 2015	2,19	2,57	2,32	1,29	2,40	1,84
Maret 2016	1,78	3,41	2,30	1,19	2,74	1,94
September 2016	1,27	2,83	1,75	1,12	2,32	1,74
Maret 2017	2,15	2,29	2,19	1,24	2,49	1,83
September 2017	1,79	2,86	2,09	1,24	2,43	1,79
Maret 2018	1,91	2,48	2,07	1,17	2,37	1,71

Sumber : Berita Resmi Statistik

**Tabel 7.5**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) menurut Tipe Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014-2018**

Tahun	D.I. Yogyakarta			Indonesia		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2014	0,53	0,40	0,48	0,31	0,57	0,44
September 2014	0,52	0,79	0,61	0,31	0,57	0,44
Maret 2015	0,71	1,09	0,83	0,36	0,71	0,53
September 2015	0,60	0,68	0,63	0,36	0,67	0,51
Maret 2016	0,38	1,05	0,59	0,27	0,79	0,53
September 2016	0,22	0,67	0,36	0,29	0,59	0,44
Maret 2017	0,58	0,47	0,55	0,31	0,67	0,48
September 2017	0,39	0,64	0,46	0,30	0,65	0,46
Maret 2018	0,47	0,59	0,50	0,29	0,63	0,44

Sumber : Berita Resmi Statistik

**Tabel 7.6**  
**Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (persen)**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	21,39	16,48	21,70	9,68	8,82
2014	20,64	15,89	20,83	9,50	8,67
2015	21,40	16,33	21,73	9,46	8,75
2016	20,30	14,55	19,34	8,21	7,70
2017	20,03	14,07	18,65	8,13	7,64

Sumber : Statistik Kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta 2018

**Tabel 7.7**  
**Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (ribuan jiwa)**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	86,50	156,61	152,38	110,84	35,62
2014	84,67	153,49	148,39	110,44	35,60
2015	88,13	160,15	155,00	110,96	35,98
2016	84,34	142,76	139,15	96,63	32,06
2017	84,15	139,59	135,70	96,73	32,18

Sumber : Statistik Kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta 2018

**Tabel 7.8**  
**Garis Kemiskinan Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (rupiah/kapita/bulan)**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	259 945	292 639	238 056	297 170	353 602
2014	265 575	301 986	243 847	306 961	366 520
2015	273 436	312 514	250 630	318 312	383 966
2016	297 353	332 057	264 637	334 406	401 193
2017	312 403	347 476	277 261	351 331	423 815

Sumber : Statistik Kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta 2018

**Table 7.9**  
**Indeks Kedalaman (P1) menurut Kabupaten/kota di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013 - 2017(persen)**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	2,69	2,63	3,54	1,43	1,24
2014	3,22	2,44	3,74	1,15	1,14
2015	4,16	3,16	4,55	1,46	1,06
2016	3,55	2,02	4,16	1,36	1,05
2017	2,79	2,21	3,36	1,23	1,58

Sumber : Statistik Kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta 2018

**Tabel 7.10**  
**Indeks Keparahan (P2) menurut Kabupaten/kota di Daerah**  
**Istimewa Yogyakarta, 2013 - 2017 (persen)**

Tahun	Kabupaten/kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	0,51	0,69	0,86	0,30	0,27
2014	0,69	0,59	1,03	0,22	0,26
2015	1,24	0,89	1,33	0,37	0,23
2016	1,00	0,41	1,30	0,34	0,19
2017	0,64	0,56	0,79	0,28	0,48

Sumber : Statistik Kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta 2018

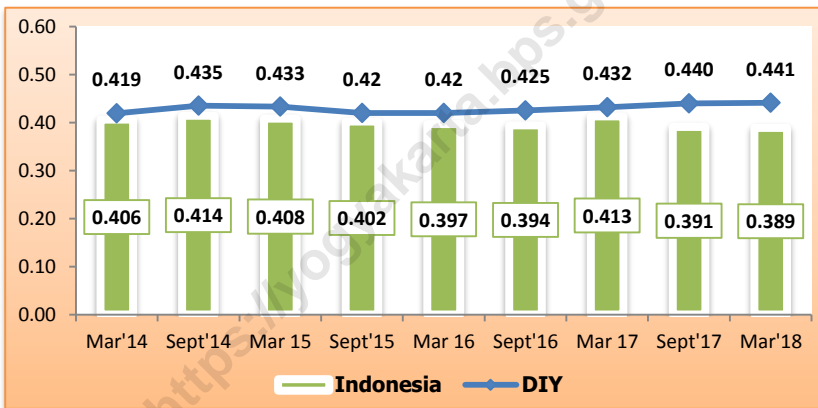
**Tabel 7.11**  
**Indikator Kemiskinan menurut Provinsi di Pulau Jawa,**  
**2017-2018**

Provinsi		Indikator Kemiskinan				
		Persentase Pddk Miskin (%)	Jml Pddk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/jiwa)	P1 (%)	P2 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>DKI Jakarta</b>	Maret 2017	3,77	389,69	536 546	0,49	0,10
	Sept 2017	3,78	393,13	578 247	0,61	0,15
	Maret 2018	3,57	373,12	593 108	0,51	0,11
<b>Jawa Barat</b>	Maret 2017	8,71	4 168,44	344 427	1,45	0,37
	Sept 2017	7,83	3 774, 41	354 679	1,39	0,35
	Maret 2018	7,45	3 615,79	367 755	1,32	0,34
<b>Jawa Tengah</b>	Maret 2017	13,01	4 450,72	333 224	2,21	0,57
	Sept 2017	12,23	4 197, 49	338 815	2,12	0,55
	Maret 2018	11,32	3 897,20	350 875	1,85	0,49
<b>DIY</b>	Maret 2017	13,02	488,53	374 009	2,19	0,55
	Sept 2017	12,36	466,33	396 271	2,09	0,46
	Maret 2018	12,13	460,10	409 744	2,06	0,50
<b>Jawa Timur</b>	Maret 2017	11,77	4 617,01	342 092	1,87	0,45
	Sept 2017	11,20	4 405,27	360 302	2,09	0,56
	Maret 2018	10,98	4 332,59	373 574	1,94	0,50
<b>Banten</b>	Maret 2017	5,45	675,04	386 753	0,86	0,19
	Sept 2017	5,59	699,83	406 988	0,78	0,16
	Maret 2018	5,24	661,36	431 069	0,82	0,20
<b>Nasional</b>	Maret 2017	10,64	27 771,22	374 478	1,83	0,48
	Sept 2017	10,12	26 582,99	387 160	1,79	0,46
	Maret 2018	9,82	25 949,80	401 220	1,71	0,44

Sumber : Berita Resmi Statistik

Ukuran ketimpangan Gini Rasio antara tahun 2002 hingga 2018 D.I. Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Hingga pada kondisi bulan Maret 2018, Gini rasio mencapai 0,441 dan tertinggi kedua selama 16 tahun tersebut. Peningkatan gini rasio ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk.

**Gambar 7.3**  
**Perkembangan Gini Rasio Tahun 2014-2018**



Bila dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, Gini Rasio D.I. Yogyakarta pada Bulan Maret 2018 adalah yang tertinggi. Ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di D.I. Yogyakarta pada periode tersebut relatif paling tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya se-pulau Jawa. Selain itu, gini rasio D.I. Yogyakarta selalu lebih rendah dari Nasional.

**Tabel 7.12**  
**Gini Rasio menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2002-2018**

<b>Tahun</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>DIY</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Banten</b>	<b>Indonesia</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
2002	0,380	0,301	0,295	0,380	0,322	0,344	0,341
2005	0,337	0,329	0,323	0,407	0,318	0,324	0,355
2007	0,367	0,357	0,338	0,378	0,348	0,379	0,376
2008	0,362	0,360	0,325	0,376	0,346	0,354	0,368
2009_Mar	0,356	0,365	0,319	0,376	0,334	0,369	0,367
2010_Mar	0,361	0,356	0,341	0,407	0,337	0,419	0,378
2011_Mar	0,438	0,411	0,383	0,401	0,374	0,404	0,410
2011_Sept	0,402	0,380	0,357	0,423	0,351	0,394	0,388
2012_Mar	0,421	0,412	0,383	0,434	0,357	0,387	0,410
2012_Sept	0,437	0,422	0,372	0,449	0,362	0,384	0,413
2013_Mar	0,433	0,411	0,387	0,439	0,364	0,399	0,413
2013_Sept	0,404	0,406	0,390	0,416	0,368	0,380	0,406
2014_Mar	0,431	0,413	0,376	0,419	0,369	0,395	0,406
2014_Sept	0,436	0,398	0,388	0,435	0,403	0,424	0,414
2015_Mar	0,431	0,415	0,382	0,433	0,415	0,401	0,408
2015_Sept	0,421	0,426	0,382	0,420	0,403	0,386	0,402
2016_Mar	0,411	0,413	0,366	0,420	0,402	0,394	0,397
2016_Sept	0,397	0,402	0,357	0,425	0,402	0,392	0,394
2017_Maret	0,413	0,403	0,365	0,432	0,396	0,382	0,413
2017_Sept	0,409	0,393	0,365	0,440	0,415	0,379	0,391
2018_Maret	0,394	0,407	0,378	0,441	0,379	0,385	0,389

Sumber: Web BPS RI

**Tabel 7.13**  
**Distribusi Pengeluaran Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**menurut Golongan Pendapatan, 2017-2018**

Provinsi	Maret 2017			September 2017			Maret 2018		
	40%	40%	20%	40%	40%	20%	40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DKI Jakarta	16,09	35,73	48,18	17,16	34,3	48,54	17,16	36,03	46,81
Jawa Barat	16,32	36,72	46,96	*	*	*	*	*	*
Jawa Tengah	18,40	37,54	44,06	18,4	37,54	44,06	18,1	38,31	43,59
DIYogyakarta	14,96	34,92	50,12	14,85	34,19	50,96	14,83	34,38	50,79
Jawa Timur	17,26	35,78	46,96	16,49	35,06	48,45	17,74	37,1	45,16
Banten	17,50	36,83	45,67	17,95	36,62	45,43	17,54	36,53	45,93
Indonesia	<b>17,12</b>	<b>36,47</b>	<b>46,40</b>	<b>17,22</b>	<b>36,66</b>	<b>46,12</b>	<b>17,29</b>	<b>36,62</b>	<b>46,09</b>

Sumber: Berita Resmi Statistik

Catatan: \* : Belum tersedia

### 8.1. Konsep dan Definisi

**Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

**Kepadatan penduduk (*Population Density*)** adalah jumlah penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas daerah tersebut, biasanya dinyatakan sebagai penduduk per km<sup>2</sup>.

**Laju pertumbuhan penduduk (*LPP/Growth Rate of Population*)** adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu, Laju pertumbuhan dihitung menggunakan metode geometrik (*Geometric Rate of Growth*) yakni:

$$r = ((P_n/P_0)^{(1/n)}) - 1 ;$$

$P_0$  : Jumlah penduduk pada tahun awal

$P_n$  : Jumlah penduduk pada tahun ke-n

$r$  : Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun awal ke tahun ke-n,

$n$  : Banyak perubahan tahun,

**Rasio Jenis Kelamin (*SR/Sex Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan persen,

Rumus:

$$SR = \frac{P_L}{P_W} \times 100$$

SR : Rasio Jenis Kelamin

$P_L$  : Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki

$P_W$  : Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan

**Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas (usia tidak produktif) dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia non produktif) di suatu daerah pada waktu tertentu,

## 8.2. Manfaat

1. **Laju pertumbuhan penduduk** bermanfaat untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu,
2. **Rasio jenis kelamin** berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil,
3. **Rasio Ketergantungan** bermanfaat untuk mengetahui perkembangan besarnya beban perekonomian yang ditanggung oleh usia produktif di suatu wilayah,

### 4. Kepadatan Penduduk:

- 6,1, Untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah,
- 6,2, Digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk,

## 8.3. Interpretasi

1. **Angka kepadatan penduduk** menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap kilometer persegi, Semakin besar kepadatan penduduk menunjukkan semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut,

## 2. Laju pertumbuhan penduduk (**LPP/ Growth Rate of Population**) :

- 2.1.  $LPP > 0$  berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun  $t$  dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2.2.  $LPP = 0$  berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun  $t$  dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2.3.  $LPP < 0$  berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun  $t$  dibandingkan dengan sebelumnya.

## 3. Rasio Jenis Kelamin (**SR/ Sex Ratio**) :

- 3.1.  $SR > 100$  berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin 102. Artinya bahwa di wilayah tersebut setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.
  - 3.2.  $SR = 100$  berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.
  - 3.3.  $SR < 100$  berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
4. Semakin tinggi **rasio ketergantungan**, semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, Rasio ketergantungan suatu wilayah sebesar 49, artinya bahwa setiap 49 orang penduduk non produktif akan ditanggung oleh 100 orang penduduk produktif,

## 8.4. Sumber Data

Sumber data kependudukan adalah Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

## Ulasan

Tahun 2017 rasio jenis kelamin di semua kabupaten/kota kurang dari seratus kecuali Kabupaten Sleman yaitu 102. Artinya bahwa di Kabupaten Sleman setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

Angka ketergantungan Kabupaten Gunungkidul adalah yang tertinggi

Tingginya arus migrasi pada usia produktif diduga menjadi penyebab rasio ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi meskipun semakin menurun setiap tahun. Tahun 2012, angka ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 53. Artinya bahwa pada tahun 2017 setiap 53 orang penduduk non produktif akan ditanggung oleh 100 orang penduduk produktif.

Rata-rata pertumbuhan penduduk D.I. Yogyakarta tahun 2010-2017 mencapai 1,17 persen pertahun. Sementara laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 terhadap tahun 2016 lebih rendah yakni sebesar 1,11 persen. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, pada periode yang sama laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Bantul dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 1,19 persen, sedangkan Kabupaten Gunungkidul 0,95 persen.

Distribusi jumlah penduduk di D.I. Yogyakarta selama periode tahun 2010-2017, persentase jumlah penduduk tertinggi tinggal di Kabupaten Sleman dan terendah adalah di Kota Yogyakarta. Tercatat sebanyak 31,75 persen penduduk D.I. Yogyakarta tinggal di Kabupaten Sleman, sedangkan sekitar 11,23 persen tinggal di Kota Yogyakarta.

Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah, sebagai Ibu kota Provinsi dan Kota pendidikan, tingkat kepadatan Kota

Yogyakarta pada tahun 2017 telah mencapai 13.413 jiwa per km<sup>2</sup>. Bahkan sama dengan kabupaten/koat lainnya, tingkat kepadatannya terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Sebaliknya meskipun Kabupaten Gunungkidul mempunyai wilayah yang terluas namun kepadatan penduduknya adalah yang terendah. Tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul mencapai 504 jiwa per km<sup>2</sup>.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

**Tabel 8.1**  
**Penduduk menurut Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017**

Laki-laki

Tahun	Kabupaten/kota					
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	197 591	469 991	337 686	574 892	195 712	1 775 872
2014	199 980	475 832	341 640	581 576	198 361	1 797 389
2015	202 435	481 510	345 370	588 368	201 082	1 818 765
2016	204 831	487 292	348 825	595 158	203 845	1 839 951
2017	207 245	493 087	352 053	602 063	206 421	1,860 869

Sumber : Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta 2010-2020

**Tabel 8.1**  
**Penduduk menurut Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017**

Perempuan

Tahun	Kabupaten/kota					
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	205 588	477 081	362 505	566 841	206 967	1 818 982
2014	207 729	483 613	366 154	572 925	209 306	1 839 727
2015	209 763	490 001	369 912	579 113	211 622	1 860 411
2016	211 852	496 235	373 654	585 321	213 899	1 880 961
2017	214 050	502 177	377 311	591 449	216 311	1 901 298

Sumber : Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta 2010-2020

**Tabel 8.1**  
**Penduduk menurut Kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017**

Laki-laki + Perempuan

Tahun	Kabupaten/kota					DIY
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	403 179	947 072	700 191	1 141 733	402 679	3 594 854
2014	407 709	959 445	707 794	1 154 501	407 667	3 637 116
2015	412 198	971 511	715 282	1 167 481	412 704	3 679 176
2016	416 683	983 527	722 479	1 180 479	417 744	3 720 912
2017	421 295	995 264	729 364	1 193 512	422 732	3 762 167

Sumber : Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta 2010-2020

**Tabel 8.2**  
**Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/kota di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017**

Tahun	Kabupaten/kota					DIY
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	96	99	93	101	95	98
2014	96	98	93	102	95	98
2015	97	98	93	102	95	98
2016	97	98	93	102	95	98
2017	97	98	93	102	95	98

Sumber : Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta 2010-2020

**Tabel 8.3**  
**Rasio Ketergantungan menurut Kabupaten/kota di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017**

Tahun	Kabupaten/kota					DIY
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013	53	46	53	41	35	45
2014	53	46	53	41	35	45
2015	53	46	53	41	35	45
2016	53	46	53	41	35	45
2017	53	46	53	41	35	45

Sumber : Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta 2010-2020

**Tabel 8.4**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/kota di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2017**

Tahun	Kabupaten/kota					DIY
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010-2017	1,12	1,30	1,06	1,13	1,26	1,17
2014-2015	1,10	1,26	1,06	1,12	1,24	1,16
2015-2016	1,09	1,24	1,01	1,11	1,22	1,13
2016-2017	1,11	1,19	0,95	1,10	1,19	1,11

Sumber : Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta 2010-2020

**Tabel 8.5**  
**Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/kota,**  
**2010, 2016, dan 2017**

Kabupaten/kota	Presentase Penduduk			Kepadatan Penduduk per km2		
	2010	2016	2017	2010	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	11,25	11,20	11,19	665	711	745
Bantul	26,37	26,43	26,53	1 804	1 940	2 032
Gunungkidul	19,53	19,42	19,30	456	486	504
Sleman	31,62	31,73	31,75	1 908	2 054	2 144
Yogyakarta	11,24	11,23	11,23	11 988	12 854	13 413
<b>DIY</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 088</b>	<b>1 168</b>	<b>1 220</b>

Sumber : Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta 2010-2020

**Tabel 8.6**  
**Persentase Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya**  
**Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/kota, 2015-2017**

Kabupaten / kota	Rumah Tangga			Rata-Rata Anggota Rumah Tangga		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	10,55	10,47	10,51	3	4	4
Bantul	25,36	25,14	25,35	3	4	4
Gunungkidul	18,38	18,11	18,23	3	4	4
Sleman	32,84	32,98	32,97	3	3	3
Yogyakarta	12,86	13,30	12,94	3	3	3
<b>DIY</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Sumber : Susenas 2015-2017 Diolah

**Tabel 8.7**  
**Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2017**

Kelompok Umur	2016		2017			
	Laki-laki	Pr	Laki-laki	Pr	Laki-laki	Pr
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
0-4	140 719	134 691	140 719	134 691	140 719	134 691
5-9	138 868	131 797	138 868	131 797	138 868	131 797
10-14	135 549	128 562	135 549	128 562	135 549	128 562
15-19	134 576	129 820	134 576	129 820	134 576	129 820
20-24	154 994	151 186	154 994	151 186	154 994	151 186
25-29	161 030	153 678	161 030	153 678	161 030	153 678
30-34	141 040	139 061	141 040	139 061	141 040	139 061
35-39	132 312	134 840	132 312	134 840	132 312	134 840
40-44	130 164	134 151	130 164	134 151	130 164	134 151
45-49	127 020	134 167	127 020	134 167	127 020	134 167
50-54	115 465	125 267	115 465	125 267	115 465	125 267
55-59	99 741	107 078	99 741	107 078	99 741	107 078
60-64	78 112	82 063	78 112	82 063	78 112	82 063
65-69	54 304	62 804	54 304	62 804	54 304	62 804
70-74	39 982	50 351	39 982	50 351	39 982	50 351
75+	56 075	81 445	56 075	81 445	56 075	81 445
<b>Total</b>	<b>1 839 951</b>	<b>1 880 961</b>	<b>1 839 951</b>	<b>1 880 961</b>	<b>1 839 951</b>	<b>1 880 961</b>

Sumber : : Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta 2010-2020

### 9.1. Konsep Dan Definisi

**IPM (Human Development Indeks)** adalah indikator pengukuran pembangunan manusia yang dikenalkan pertama kali oleh UNDP tahun 1990, *Human Development Report* 1990. Tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

**Mulai tahun 2014** indikator komponen lamanya hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir ( $e_0$ ), pengetahuan diwakili oleh Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*), dan rata-rata lamanya sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*). Adapun komponen standar hidup layak diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita setahun disesuaikan.

**Angka Harapan Hidup (Life Expectancy :  $e_0$ )** saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

**Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling: EYS*)** adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

## **Rata-rata lama sekolah-RLS (*Mean Years Of Schooling :MYS*)**

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

## **Pengeluaran per Kapita di Sesuaikan**

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

## **9.2. Penghitungan Indikator**

### **9.2.1. Penghitungan komponen**

Sebelum menghitung indeks dihitung dulu nilai masing-masing komponen Beberapa variabel yang diperlukan antara lain:

- **Angka Harapan Hidup(AHH) :** Variabel Anak Lahir Hidup, Anak Masih Hidup. **Penghitungan AHH** secara tidak langsung (*indirect technique*) dengan menggunakan dua data dasar yakni rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live birth*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) untuk setiap wanita berusia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan  $e_0$  dilakukan dengan perangkat lunak *Mortpak Life*, Penghitungan angka harapan hidup ini menggunakan paket program Mortpack dengan metode Trussel dan model West.
- **Harapan Lama Sekolah (HLS):** Partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Kelemahan tidak meng-cover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun.

## Rumus Penghitungan HLS

$$HLS_7 = \sum_{i=7}^n \frac{E_i}{P_i}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

$E_i$  = Jumlah penduduk usia  $i$  yang bersekolah

$P_i$  = Jumlah seluruh penduduk usia  $i$

$i$  = Usia (7,8,9...,n)

- **Rata-rata Lama Sekolah(RLS):** Kombinasi variabel pendidikan seperti Angka Partisipasi Sekolah, Jenjang pendidikan yang pernah diduduki. Kelas yang sedang dijalani dan Jenjang pendidikan yang ditamatkan. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi proses pendidikan sudah berakhir.

**Lama sekolah= Konversi tahun + Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki-1**

Penghitungan rata-rata lama sekolah(RLS):

$$RLS = \frac{\sum_i f_i \times L_i}{\sum_i f_i}$$

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

$f_i$  = Frekuensi penduduk usia 25 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan ke- $i$

$L_i$  = Lama sekolah untuk jenjang pendidikan ke- $i$

$i$  = Jenjang Pendidikan ke- $i$

- **Pengeluaran per Kapita di sesuaikan:** ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

*Rata-rata pengeluaran per kapita* dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

*Perhitungan paritas daya beli* pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan, Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode *Rao*.

Untuk menjamin keterbandingan yang standar, baik antar daerah maupun secara runtun waktu (tahun), beberapa tahapan prosedur yang harus ditempuh dalam penghitungan pengeluaran per kapita setahun disesuaikan disesuaikan.

### 9.2.2. Penghitungan Indeks Komponen

Kemudian masing-masing komponen IPM dihitung indeks dengan rumus sebagai berikut:

$X_i$  : Indikator ke- $i$  ;  $i=1,2,3$

$X_{i\ Max}$ : Indikator maksimum  $X_i$

$X_{i\ Min}$  : Indikator minimum  $X_i$

$$Indeks\ X_i = \frac{X_i - X_{i\ Min}}{X_{i\ Max} - X_{i\ Min}}$$

Standar nilai masing-masing komponen IPM yaitu:

No,	Komponen	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	83,04	20
2.	<i>Expected Years of Schooling (tahun)</i>	18	0
3.	<i>Mean Years of Schooling (tahun)</i>	15	0
4.	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	26,572,352** (IDR)	1,007,436* (IDR)

**Keterangan:**

- \* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- \*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

**9.2.3. Indeks Komposit atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Mulai tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometrik.

Rumus: 
$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Pendidikan =  $\frac{1}{2}$ ( indeks harapan lama sekolah + indeks rata-rata lama sekolah)

**9.3. Interpretasi**

Mengetahui capaian pembangunan manusia dilakukan melalui:

1. Kenaikan IPM secara nilai absolut yang diukur dengan pertumbuhan IPM.
2. Kenaikan status pembangunan manusia berdasarkan kategori UNDP:
  - 2.1.  $IPM < 60$ ; status pembangunan manusia rendah,
  - 2.2.  $60 \leq IPM < 70$ ; status pembangunan manusia sedang,
  - 2.3.  $70 \leq IPM < 80$ ; status pembangunan manusia tinggi,
  - 2.4.  $IPM \geq 80$ ; status pembangunan manusia sangat tinggi

#### **9.4. Manfaat**

- i. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia.
- ii. Kecepatan menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode.
- iii. Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.
- iv. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
- v. IPM dijadikan sebagai salah satu indikator target pemerintah.

#### **9.5. Sumber Data**

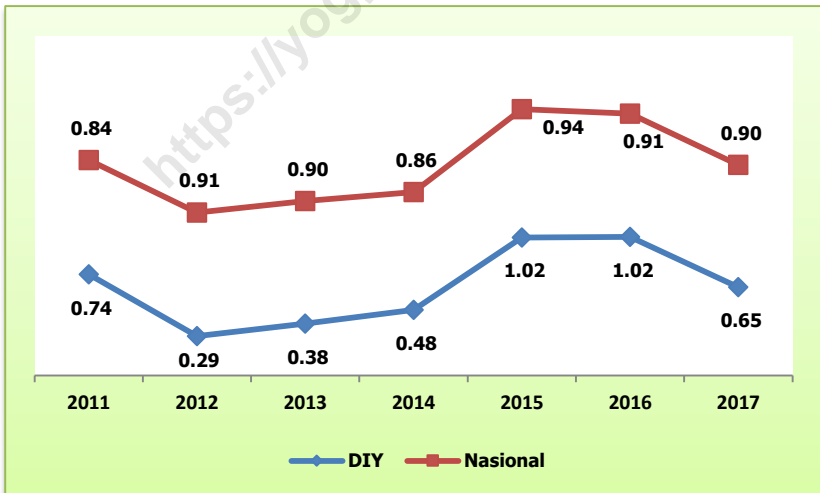
1. Angka harapan hidup dihitung menggunakan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 dan Susenas.
2. Angka melek huruf, lama sekolah dan angka harapan hidup menggunakan data pokok Susenas Kor.
3. Daya beli/standar hidup layak menggunakan data pokok Susenas Modul Konsumsi yang didasarkan pada 96 komoditi, didukung oleh data lain seperti Indeks Harga Konsumen, Supas dan Proyeksi Penduduk.

## Ulasan

Pembangunan manusia D.I. Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Indeks pembangunan Manusia(IPM) memperlihatkan bahwa hingga periode tahun 2010-2017 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IPM D.I. Yogyakarta sebesar 78,89 sehingga status pembangunan manusia masuk dalam kategori tinggi. Meski pada tahun 2017 mampu tumbuh 0,65 persen, namun angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2016 dan tahun 2015. Dan pada periode ini, juga lebih rendah dari pertumbuhan IPM Nasional yang mencapai 0,90 persen.

IPM 2017  
tumbuh 0,65  
persen.

**Gambar 9.1**  
**Trend Pertumbuhan IPM D.I. Yogyakarta 2011-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara spasial, angka IPM menurut Kabupaten/kota terjadi gap yang cukup tinggi. IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta yakni sebesar

85,49 sedangkan IPM terendah Kabupaten Gunungkidul baru mencapai 68,73. Artinya terjadi gap sebesar 16,76 poin. Dengan kata lain, bila secara rata-rata pertumbuhan IPM dalam 4 tahun terakhir tercatat 0,91 poin maka butuh 18 tahun untuk menyamai IPM Kota Yogyakarta. Dengan demikian, akselerasi pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul harus segera dilakukan untuk mengejar pembangunan manusia di kabupaten/kota lainnya. Bila hal ini tidak dilakukan akan tetap tertinggal dari daerah lain dengan IPM Tinggi.

Sementara ini selain terjadi gap yang cukup tinggi, pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul masih tergolong rendah tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang sudah berstatus tinggi dan sangat tinggi. Menyikapi fenomena ini, peningkatan pembangunan manusia perlu diperhatikan menurut komponen.

IPM menurut komponen, mengindikasikan kecenderungan terjadi peningkatan pembangunan manusia untuk ketiga sektor dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, peningkatan indeks pembangunan pendidikan cukup tinggi akibat tingginya peningkatan nilai angka Harapan Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka harapan hidup tertinggi adalah Kabupaten Kulonprogo, sedangkan dari komponen pendidikan, dilihat dari nilai indikator angka harapan hidup dan lama sekolah, tertinggi adalah Kota Yogyakarta.

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, tampak bahwa nilai IPM Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat ke dua, setelah DKI Jakarta. Selain itu, IPM Daerah Yogyakarta masih berada di atas IPM Nasional. IPM D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai 78,89 sedangkan di tingkat Nasional sebesar 70,81.

**Tabel 9.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	70,14	70,68	71,52	72,38	73,23
Bantul	76,78	77,11	77,99	78,42	78,67
Gunungkidul	66,31	67,03	67,41	67,82	68,73
Sleman	80,26	80,73	81,20	82,15	82,85
Yogyakarta	83,61	83,78	84,56	85,32	85,49
DIY	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89
<b>Nasional</b>	<b>68,31</b>	<b>68,90</b>	<b>69,55</b>	<b>70,18</b>	<b>70,81</b>

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta 2017

**Tabel 9.2**  
**Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/kota**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (tahun)**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	74,89	74,90	75,00	75,03	75,06
Bantul	73,22	73,24	73,44	73,50	73,56
Gunungkidul	73,38	73,39	73,69	73,76	73,82
Sleman	74,47	74,47	74,57	74,60	74,63
Yogyakarta	74,05	74,05	74,25	74,30	74,35
<b>DIY</b>	<b>74,45</b>	<b>74,50</b>	<b>74,68</b>	<b>74,71</b>	<b>74,74</b>

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta 2017

**Tabel 9.3**  
**Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/kota**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (tahun)**

<b>Kabupaten/ kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	13,00	13,27	13,55	13,97	14,23
Bantul	14,35	14,62	14,72	14,73	14,74
Gunungkidul	12,49	12,82	12,92	12,93	12,94
Sleman	15,52	15,64	15,77	16,08	16,48
Yogyakarta	15,89	15,97	16,32	16,81	16,82
<b>DIY</b>	<b>14,67</b>	<b>14,85</b>	<b>15,03</b>	<b>15,23</b>	<b>15,42</b>

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta 2017

**Tabel 9.4**  
**Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/kota di Daerah**  
**Istimewa Yogyakarta, 2013-2017 (tahun)**

<b>Kabupaten/ kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	8,02	8,20	8,40	8,50	8,64
Bantul	8,72	8,74	9,08	9,09	9,20
Gunungkidul	6,22	6,45	6,46	6,62	6,99
Sleman	10,03	10,28	10,30	10,64	10,65
Yogyakarta	11,36	11,39	11,41	11,42	11,43
<b>DIY</b>	<b>8,72</b>	<b>8,84</b>	<b>9,00</b>	<b>9,12</b>	<b>9,19</b>

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta 2017

**Tabel 9.5**  
**Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut**  
**Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017 (Rp/tahun)**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	8 468	8 480	8 688	8 938	9 277
Bantul	13 902	13 921	14 320	14 880	14 995
Gunungkidul	8 202	8 235	8 336	8 467	8 788
Sleman	14 085	14 170	14 562	14 921	15 365
Yogyakarta	16 645	16 755	17 317	17 770	18 005
<b>DIY</b>	<b>12 261</b>	<b>12 294</b>	<b>12 684</b>	<b>13 229</b>	<b>13 521</b>

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta 2017

**Tabel 9.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Jawa,**  
**2013-2017**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
DKI Jakarta	78,08	78,39	78,99	79,60	80,06
Jawa Barat	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69
Jawa Tengah	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52
DIY	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89
Jawa Timur	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27
Banten	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42
<b>Nasional</b>	<b>68,31</b>	<b>68,90</b>	<b>69,55</b>	<b>79,60</b>	<b>70,81</b>

Sumber : Tabel Dinamis, Web BPS RI



### 10.1. Konsep dan Definisi

**Angka Partisipasi Sekolah (APS/*School Enrolment Rate*)** adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Nilai ideal APS adalah 100%.

$$APS = \frac{N_1}{N_2} \times 100\%$$

$N_1$  = Jumlah murid berbagai jenjang pendidikan pada kelompok usia sekolah tertentu

$N_2$  = Jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sesuai,

**Angka Partisipasi Murni (APM/*Net Enrolment Rate*)** adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

$$APM = \frac{\text{Jml murid kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}^1}{\text{Jml penduduk kelompok usia tertentu}^2} \times 100\%$$

Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7-12 tahun

Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13-15 tahun

Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16-18 tahun

**Angka Partisipasi Kasar (APK/*Gross Enrolment Ratio*)** adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APK = \frac{\text{Jml murid di jenjang pendidikan tertentu}^*)}{\text{Jml penduduk kelompok usia tertentu}^*)} \times 100\%$$

Keterangan: \*)

Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7-12 tahun

Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13-15 tahun

Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16-18 tahun

**Angka Buta Huruf** adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.

## 10.2. Manfaat

1. APS digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.
2. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.
3. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak bersekolah tepat pada waktunya.
4. Angka Buta Huruf digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan, membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

## 10.3. Interpretasi

1. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.
2. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur

yang seharusnya.

3. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Murni (APM).
4. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

#### **10.4. Sumber Data**

Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

#### **10.5. Keterbatasan**

1. APS tidak memberikan gambaran tentang jenjang pendidikan yang sedang dijalani.
2. APK dapat melebihi 100 persen akibat dimasukkannya penduduk yang berpartisipasi sekolah berada di bawah umur dan atau melebihi umur karena lebih awal atau terlambat mendaftar dan mengulang kelas.
3. APM untuk pendidikan tinggi, tidak relevan karena kesulitan dalam menentukan kelompok umur yang tepat karena banyaknya variasi program-program di tingkat pendidikan ini.

## Ulasan

Kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari capaian pembangunan sektor pendidikan. Pertama adalah melihat seberapa besar penduduk yang sudah mengakses pendidikan. Indikator angka partisipasi sekolah (APS) Daerah Istimewa Yogyakarta

APK  
SM/ sederajat  
di Kabupaten  
Gunungkidul  
masih rendah

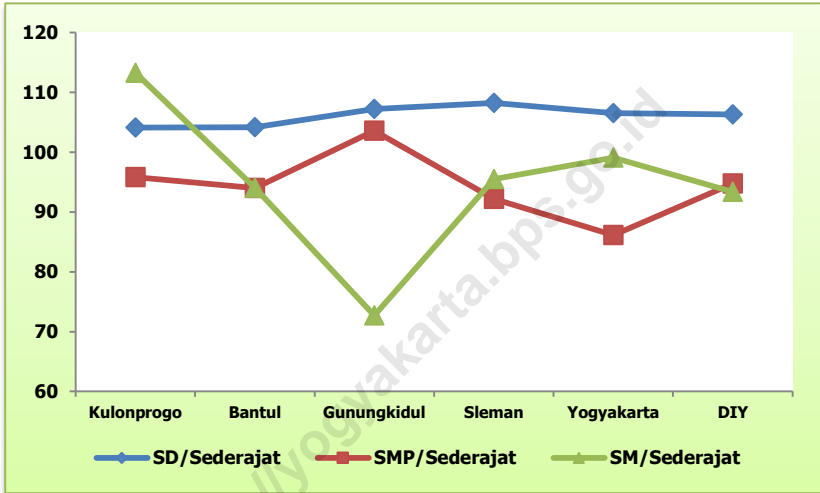
(DIY) tahun 2013-2017 cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kelompok umur. Dapat dikatakan bahwa semakin meningkat kelompok umur maka jumlah penduduk yang aktif memanfaatkan fasilitas pendidikan baik formal maupun non formal semakin menurun.

Tabel 10.1 tampak bahwa partisipasi sekolah tahun 2017 untuk kelompok umur 7-12 tahun dan kelompok umur 13-15 relatif masih tinggi yakni sebesar 99,87 persen dan 99,63 persen. Akan tetapi dengan kelompok umur semakin tinggi persentasenya semakin sedikit, hingga pada kelompok umur 19-24 tahun hanya tercatat 51,33 persen.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, tampak bahwa penduduk di Kabupaten Gunungkidul angka APS masih rendah terutama untuk kelompok usia 19-24 tahun. APS pada kelompok tersebut hanya sebesar 16,30 persen. Sementara meski bukan lagi kelompok usia wajib sekolah, namun 4 kabupaten/kota lainnya, APS masih berkisar antara 40 hingga 60 persen.

Indikator APK Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 menunjukkan pola yang sama dengan periode sebelumnya. Nilai APK semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan sekolah. Nilai APK juga semakin meningkat di semua jenjang pendidikan. APK SD/ sederajat nilainya lebih dari 100 persen. Dengan demikian masih terdapat anak yang tinggal kelas, terlambat masuk SD atau sebaliknya terlalu dini bersekolah SD.

**Gambar 10.1**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017**



Ditinjau menurut kabupaten/kota, nilai APK SD/ sederajat di semua Kabupaten/kota lebih dari 100 persen. Ini berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya di jenjang SMP. Selain jenjang pendidikan SD, APK SMP/ sederajat Kabupaten Gunungkidul juga lebih dari 100 persen. Ini menandakan ada penduduk usia diluar usia seharusnya masih di jenjang pendidikan SMP.

Kemudian berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM), APM 2017 antar jenjang pendidikan memiliki kemiripan pola dengan APK, dimana jenjang pendidikan SD/ sederajat menghasilkan APM paling tinggi dari seluruh jenjang pendidikan yaitu sebesar 99,29. Selanjutnya diikuti jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Menurut tabel 10.7 terungkap bahwa nilai APM SMP/ sederajat mencapai 83,25 persen. Ini berarti sebagian

besar penduduk usia 7-15 tahun sudah mengenyam pendidikan dasar sesuai dengan jenjang pendidikan sekolahnya.

Perbandingan APM menurut kabupaten/kota, semua nilai APM SD/ sederajat kurang dari 100 namun telah melampaui angka provinsi. Tabel 4 menjelaskan bahwa lebih dari 99 persen penduduk usia 7-12 tahun di semua kabupaten/kota sudah bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan dasar. Dari lima kabupate/kota di D.I. Yogyakarta, nilai APM SD/ sederajat Kota Yogyakarta adalah yang terendah yakni sebesar 97,91 persen.

Indikator kemampuan baca tulis ditunjukkan oleh angka buta huruf. Meskipun angka buta huruf 15-24 tahun D.I. Yogyakarta tahun 2017 cukup tinggi namun belum mencapai nilai 0 persen, sehingga masih ada penduduk yang tidak bisa baca tulis. Buta huruf masih ditemukan di kabupaten Gunungkidul, sedangkan kabupaten/kota lainnya angka buta hurufnya sudah 0 persen.

Dari sisi lamanya jenjang pendidikan yang diakses, lebih dari 55 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 telah menamatkan jenjang pendidikan SLTA ke atas. Kabupaten Gunungkidul baru mencapai 29,49 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang sudah berijazah SLTA keatas. Sementara empat kabupaten/kota lainnya telah mencapai lebih dari 40 persen. Keteringgalan ini bukan tanpa alasan. Keterbatasan gedung sekolah jenjang STLA/ sederajat beserta sulinya akses menuju sarana pendidikan tersebut menjadi salah satu masih rendahnya penduduk berijazah SLTA keatas.

**Tabel 10.1**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017 (persen)**

Tahun	D.I. Yogyakarta				Indonesia			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2013	99,96	96,79	81,41	45,86	98,42	90,81	63,84	20,14
2014	99,94	99,48	86,44	49,08	98,92	94,44	70,31	22,82
2015	99,89	99,68	86,78	49,17	99,09	94,72	70,61	22,95
2016	99,84	99,62	87,20	49,95	99,09	94,88	70,83	23,93
2017	99,87	99,63	87,61	51,33	99,14	95,08	71,42	24,77

Sumber: Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 10.2**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/kota**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016 - 2017 (persen)**

Tahun	2016				2017			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kulonprogo	99,54	100,00	91,81	45,02	99,82	99,66	85,80	42,72
Bantul	99,63	99,02	88,48	39,02	100,00	100,00	91,15	40,42
Gunungkidul	100,00	99,45	76,81	14,51	99,81	99,29	82,31	16,30
Sleman	100,00	100,00	90,56	61,70	100,00	99,93	86,38	63,95
Yogyakarta	100,00	100,00	86,17	65,38	99,22	98,65	92,82	63,21
<b>DIY</b>	<b>99,84</b>	<b>99,62</b>	<b>87,20</b>	<b>49,95</b>	<b>99,87</b>	<b>99,63</b>	<b>87,61</b>	<b>51,33</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat D.I. Yogyakarta 2016-2017

**Tabel 10.3**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Provinsi di Pulau Jawa,**  
**2016-2017(persen)**

Tahun	2016				2017			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DKI Jakarta	99,61	97,47	70,83	23,06	99,67	97,64	71,50	24,60
Jawa Barat	99,54	93,41	65,82	20,37	99,51	93,77	66,62	21,50
Jawa Tengah	99,58	95,41	67,95	21,59	99,62	95,48	68,48	22,13
DI Yogyakarta	99,84	99,62	87,20	49,95	99,87	99,63	87,61	51,33
Jawa Timur	99,46	96,69	70,54	22,67	99,57	96,77	71,51	23,34
Banten	99,43	95,59	67,00	20,74	99,31	95,67	67,77	21,33
<b>Nasional</b>	<b>99,09</b>	<b>94,88</b>	<b>70,83</b>	<b>49,95</b>	<b>99,14</b>	<b>95,08</b>	<b>71,42</b>	<b>24,77</b>

Sumber: Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 10.4**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017 (persen)**

Tahun	D.I. Yogyakarta			Indonesia		
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
2013	108,50	83,37	90,04	107,71	85,96	66,61
2014	109,11	90,66	94,62	108,88	88,63	74,26
2015	106,69	97,88	82,64	110,50	91,17	78,02
2016	106,75	93,15	91,87	109,31	90,12	80,89
2017	106,29	94,77	93,38	108,50	90,23	82,84

Sumber: BPS-RI Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 10.5**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/kota**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 (persen)**

<b>Kabupaten/ kota</b>	<b>SD/MI/ Paket A</b>	<b>SMP/MTs/ Paket B</b>	<b>SM/SMK/MA/ Paket C</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Kulonprogo	104,12	95,84	113,28
Bantul	104,19	94,01	94,06
Gunungkidul	107,23	103,59	72,71
Sleman	108,25	92,17	95,50
Yogyakarta	106,51	86,16	99,09
<b>DIY</b>	<b>106,29</b>	<b>94,77</b>	<b>93,38</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat DIY, 2017

**Tabel 10.6**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi di Pulau Jawa,**  
**2016-2017 (persen)**

Tahun	2016			2017		
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SM/SMK/ MA/ Paket C
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
DKI Jakarta	104,32	90,89	73,09	103,37	93,88	79,51
Jawa Barat	108,09	89,58	70,56	107,54	88,80	76,48
Jawa Tengah	109,46	89,96	86,27	108,44	91,09	84,35
DIY	106,75	93,15	91,87	106,29	94,77	93,38
Jawa Timur	108,17	92,54	81,23	106,79	92,22	81,43
Banten	109,05	92,17	71,65	109,56	91,14	75,89
<b>Nasional</b>	<b>109,31</b>	<b>90,12</b>	<b>80,89</b>	<b>108,50</b>	<b>90,23</b>	<b>82,84</b>

Sumber: Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 10.7**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017 (persen)**

Tahun	D.I. Yogyakarta			Indonesia		
	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/M A/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/M A/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
2013	98,75	84,57	64,86	95,59	73,88	54,25
2014	98,98	82,20	68,46	96,45	77,53	59,35
2015	99,23	82,86	68,60	96,70	77,82	59,71
2016	99,21	83,05	68,96	96,82	77,95	59,95
2017	99,29	83,25	69,66	97,19	78,40	60,37

Sumber: Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 10.8**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/kota**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2017 (persen)**

Tahun	2016			2017		
	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts / Paket B	SM/SMK /MA/ Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts / Paket B	SM/SMK/ MA/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Kulonprogo	97,65	89,35	85,47	97,97	89,22	80,90
Bantul	99,63	85,07	71,09	99,29	84,45	73,92
Gunungkidul	100,00	91,91	58,24	99,75	92,09	60,76
Sleman	100,00	75,79	67,71	99,88	76,42	67,60
Yogyakarta	95,72	75,68	68,40	97,91	75,12	70,33
<b>DIY</b>	<b>99,21</b>	<b>83,05</b>	<b>68,96</b>	<b>99,29</b>	<b>83,25</b>	<b>69,66</b>

Sumber: Susenas 2016-2017 diolah

**Tabel 10.9**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Provinsi di Pulau Jawa,**  
**2016-2017(persen)**

Tahun	2016			2017		
	SD/MI/ Paket	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	SD/MI/ Paket	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	97,01	80,35	59,30	97,64	80,72	59,54
Jawa Barat	97,82	79,76	56,92	98,05	80,29	57,22
Jawa	96,64	78,89	58,49	97,13	79,13	59,20
DI Y	99,21	83,05	68,96	99,29	83,25	69,66
Jawa Timur	97,49	81,35	60,76	97,77	81,52	61,49
Banten	97,22	79,93	57,21	97,56	80,59	57,88
<b>Nasional</b>	<b>96,82</b>	<b>77,95</b>	<b>59,95</b>	<b>97,19</b>	<b>78,40</b>	<b>60,37</b>

Sumber: Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 10.10**  
**Persentase Penduduk yang Buta Huruf menurut**  
**Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017**

Tahun	15+			15-24		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	1,71	7,77	4,83	0,00	0,00	0,00
Bantul	2,47	7,37	4,94	0,00	0,00	0,00
Gunungkidul	7,16	17,39	12,54	0,00	0,89	0,44
Sleman	1,07	4,81	2,93	0,00	0,00	0,00
Yogyakarta	1,14	1,57	1,36	0,00	0,00	0,00
<b>DIY</b>	<b>2,66</b>	<b>7,95</b>	<b>5,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,06</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat D.I. Yogyakarta, 2017

**Tabel 10.11**  
**Persentase Penduduk yang Buta Huruf menurut Provinsi di**  
**Pulau Jawa, 2016-2017**

Tahun	2016			2017		
	15+	15-44	45+	15+	15-44	45+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	0,36	0,08	0,99	0,33	0,06	0,92
Jawa Barat	1,78	0,23	4,90	1,77	0,26	4,71
Jawa Tengah	6,70	0,36	15,75	6,61	0,36	15,38
DI Y	5,41	0,13	12,63	5,36	0,20	12,38
Jawa Timur	8,41	1,09	18,84	8,18	1,01	18,27
Banten	2,45	0,19	8,30	2,43	0,21	7,97
<b>Nasional</b>	<b>4,62</b>	<b>1,00</b>	<b>11,47</b>	<b>4,50</b>	<b>0,94</b>	<b>11,08</b>

Sumber: Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 10.12**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan**  
**Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi di Pulau Jawa, 2017**

Tingkat Pendidikan	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tidak Punya Ijazah	6,05	12,69	16,54	9,69	16,38	12,35	12,51
SD/MI	14,49	27,98	24,26	16,67	23,91	19,74	22,10
SMP/MTs	19,47	22,28	23,24	18,10	21,23	22,33	21,39
SMA/MA	30,01	19,78	17,85	25,38	21,40	25,55	24,46
SMK/MAK	10,78	7,66	8,79	14,42	7,97	7,50	7,73
DI/DII	0,69	0,59	0,59	1,20	0,61	0,58	0,68
DIII	4,52	2,35	2,13	3,59	1,34	5,52	2,45
DIV/S1/S2/S3	14,19	6,66	6,59	11,26	7,14	9,42	8,68

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017

**Tabel 10.13**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan**  
**Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/kota di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017**

Tingkat Pendidikan	Tidak Punya Ijazah	SD/MI /P-A	SMP/ MTs/PB	SMA/ MA/PC	SMK/ MAK	DI/D II	DIII	DIV/S 1/ S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kulonprogo	10,02	26,60	21,39	20,83	14,63	0,62	1,42	4,48
Bantul	8,60	21,13	19,96	23,39	13,70	0,88	3,52	8,81
Gunungkidul	11,51	33,20	25,79	15,44	9,16	1,10	0,56	3,23
Sleman	5,87	16,00	18,40	25,87	16,55	1,04	3,36	12,90
Yogyakarta	5,57	12,58	17,01	30,93	14,23	2,27	4,67	12,73
<b>DIY</b>	<b>8,03</b>	<b>21,20</b>	<b>20,30</b>	<b>23,40</b>	<b>13,99</b>	<b>1,11</b>	<b>2,84</b>	<b>9,13</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat D.I. Yogyakarta, 2017

**Tabel 10.14**  
**Banyaknya Sarana Pendidikan menurut Kabupaten/kota**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017**

Kabupaten/kota	TK	SD/MI/RA	SMP	SMU/	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	323	394	80	22	36
Bantul	518	427	113	48	49
Gunungkidul	571	629	141	31	46
Sleman	504	592	140	66	57
Yogyakarta	214	170	66	49	30
<b>DIY</b>	<b>2130</b>	<b>2212</b>	<b>540</b>	<b>216</b>	<b>218</b>

Sumber: Provinsi D.I.Yogyakarta Dalam Angka 2018



### 11.1. Konsep dan Definisi

**Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate: IMR*)** adalah banyaknya kematian bayi usia di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

$$IMR = \frac{D_0}{B} \times K$$

$D_0$  = Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari satu tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu

$B$  = Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di daerah tertentu

$K$  = Bilangan konstan 1000

**Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain.

**Persentase Balita yang Ditolong Penolong Kelahiran (*Percentage of Children Under Five by Birth Attendants*)** terbagi menjadi nakes (tenaga kesehatan/medis) dan non-nakes (tenaga non-medis), Manfaat indikator ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

**Umur Perkawinan Pertama** adalah umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali.

**Penggunaan Alat/Cara Keluarga Berencana (KB)** adalah alat atau

cara KB yang digunakan oleh responden selama referensi waktu survei, yaitu sebulan terakhir.

### **11.2. Sumber Data**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

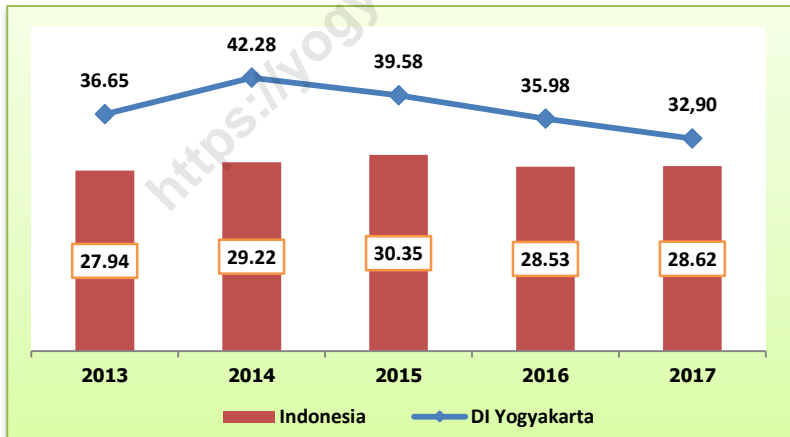
<https://yogyakarta.bps.go.id>

## Ulasan

Tabel 11.2 terlihat bahwa secara umum penolong proses kelahiran terakhir di Tahun 2017 mayoritas ditolong oleh tenaga medik. Hanya di Kabupaten Gunungkidul terdapat sebanyak 0,60 persen proses kelahiran masih ditolong oleh dukun beranak. Sementara menurut distribusinya, presentase penolong proses kelahiran oleh bidan tercatat yang tertinggi di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo dan 3 kabupaten/kota lainnya adalah dokter kandungan.

Angka keluhan D.I. Yogyakarta 2017 mencapai 32,90 persen

**Gambar 11.1**  
**Angka Keluhan Kesehatan Tahun 2013-2017**



Kemudian derajat kesehatan dari angka keluhan kesehatan terungkap lebih dari 30 persen penduduk D.I. Yogyakarta yang merasakan keluhan kesehatan. Presentase keluhan kesehatan tertinggi terjadi di Kabupaten Kulonprogo yakni mencapai 39,85 persen. Selanjutnya, angka keluhan kesehatan menurut provinsi se-pulau Jawa berkisar antara 20

hingga 30 persen. Meskipun secara persentase hampir sama dengan provinsi lainnya, D.I. Yogyakarta mempunyai keluhan kesehatan tertinggi sepanjang lima tahun terakhir. Tercatat 32,90 persen penduduk mempunyai keluhan kesehatan di tahun 2017. Selain itu, angka keluhan D.I. Yogyakarta juga masih lebih tinggi dari angka Nasional sepanjang periode yang sama.

Pembangunan sektor kesehatan tentunya tak lepas dari ketersediaan sarana kesehatan di suatu wilayah. Dari sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang tersedia, terlihat bahwa semua kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki tempat-tempat pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat dalam menjaga daya tahan tubuh dan pengobatan penyakit. Tahun 2017, tercatat sebanyak 79 rumah sakit ada di D.I. Yogyakarta yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Sebanyak 28 diantaranya terletak di kabupaten Sleman, sedangkan Kabupaten Gunungkidul dengan kepadatan penduduk terendah memiliki 6 rumah sakit.

Tingkat kesehatan rumah tangga juga ditentukan oleh peran anggota rumah tangga usia subur berstatus kawin dalam mengatur jarak kelahiran anak-anaknya. Selain agar anak mendapatkan asupan gizi dan perhatian yang cukup dari orang tuanya, pengaturan jarak kehamilan juga akan membantu ibunya agar dapat mempersiapkan dan memberikan calon bayi dengan sebaik mungkin sehingga bayi yang di lahirkan tumbuh dengan sehat. Berdasarkan data Susenas periode tahun 2013-2017, wanita subur yang sedang menggunakan alat KB semakin menurun setiap tahun. Tahun 2013 tercatat sebesar 63,04 persen hingga pada tahun 2017 hanya sebesar 53,59 persen. Sementara menurut kabupaten/kota berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Akan tetapi secara keseluruhan lebih dari 50 persen wanita usia subur di seluruh kabupaten/kota sedang menggunakan alat KB. Presentase tertinggi tahun 2017 adalah di Kabupaten Kulonprogo yakni sebesar 59,15 persen.

**Tabel 11.1**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi di**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**

<b>Tahun</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>DI Yogyakarta</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Banten</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1971	129	167	144	102	120	-
1980	82	134	99	62	97	-
1990	40	90	65	42	64	-
1994	30	89	51	30	62	-
1997	26	61	45	23	36	-
2000	25	57	44	25	48	66
2002	35	44	36	20	43	38
2007	28	39	26	19	35	46
2010	14	26	21	16	25	24
2012	22	30	32	25	30	32

Sumber: Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 11.2**  
**Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin**  
**Menurut Kab/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2017**

<b>Kabupaten/ kota</b>	<b>Penolong Kelahiran</b>				
	<b>Dokter kandungan</b>	<b>Dokter umum</b>	<b>Bidan</b>	<b>Perawat</b>	<b>Dukun Beranak/paraji</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	27,61	1,88	68,41	2,10	0,00
Bantul	51,27	0,00	48,01	0,73	0,00
Gunungkidul	37,93	0,00	61,47	0,00	0,60
Sleman	53,36	0,70	45,94	0,00	0,00
Yogyakarta	66,39	3,38	30,22	0,00	0,00
<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>48,39</b>	<b>0,79</b>	<b>50,2</b>	<b>0,48</b>	<b>0,10</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat D.I. Yogyakarta, 2017

**Tabel 11.3**  
**Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan**  
**menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta,**  
**2013-2017**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2106</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	38,21	42,44	42,60	42,09	39,85
Bantul	34,85	42,09	41,57	34,99	33,22
Gunungkidul	38,52	41,84	38,17	35,38	31,28
Sleman	35,53	43,82	39,80	35,55	31,45
Yogyakarta	39,28	38,93	33,66	34,45	32,12
<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>36,65</b>	<b>42,28</b>	<b>39,58</b>	<b>35,98</b>	<b>32,90</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat D.I. Yogyakarta, 2017

**Tabel 11.4**  
**Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan**  
**menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2013-2017**

<b>Provinsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
DKI Jakarta	29,75	30,45	33,39	30,45	27,05
Jawa Barat	27,79	28,23	28,11	28,32	29,26
Jawa Tengah	31,93	32,92	35,52	33,39	32,72
DI Yogyakarta	36,65	42,28	39,58	35,98	32,90
Jawa Timur	27,58	30,21	33,45	29,88	31,48
Banten	29,08	29,48	30,34	28,30	27,51
<b>Indonesia</b>	<b>27,94</b>	<b>29,22</b>	<b>30,35</b>	<b>28,53</b>	<b>28,62</b>

Sumber: Tabel Dinamis, Web BPS RI

**Tabel 11.5**  
**Banyaknya Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan menurut**  
**Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017**

<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Kulonprogo</b>	<b>Bantul</b>	<b>Gunung kidul</b>	<b>Sleman</b>	<b>Yogyakarta</b>	<b>DIY</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Rumah Sakit (RS)	8	16	6	28	21	79
RS Bersalin	15	14	0	3	11	43
Puskesmas	21	27	30	25	18	121
Dokter Spesialis	75	234	63	817	525	1714
Dokter Umum	117	231	107	402	378	1235
Dokter Gigi	31	61	36	243	179	550

Sumber:Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018

**Tabel 11.6**  
**Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin**  
**yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB Menurut Provinsi,**  
**2013-2017**

<b>Kabupaten/kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2106</b>	<b>2107</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Kulonprogo	59,78	62,10	59,24	53,77	59,15
Bantul	63,71	64,44	62,44	59,78	51,22
Gunungkidul	68,02	64,09	65,27	60,23	57,00
Sleman	61,26	58,61	55,16	53,25	51,90
Yogyakarta	59,80	54,88	52,12	48,03	52,42
<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>63,04</b>	<b>61,41</b>	<b>59,33</b>	<b>56,02</b>	<b>53,59</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat D.I. Yogyakarta, 2013 - 2017



### 1.2.1. Konsep dan Definisi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator yang memberikan gambaran kinerja demokrasi dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi, perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.

### 1.2.2. Pengumpulan Data IDI

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, meliputi .Koding berita/informasi dari koran dan dokumen resmi, *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara mendalam.

IDI merupakan indeks kumulatif yang terdiri dari 3 aspek yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Secara lebih rinci terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator.

Proses penghitungan IDI yakni:

1. Menghitung skor akhir untuk setiap indikator;
2. Menghitung indeks provinsi;
3. Menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional.

### 1.2.4. Interpretasi

Indeks Demokrasi di Indonesia dikelompokkan menurut tiga kategori kinerja demokrasi yaitu : *High Performing Democracy* (Indeks > 80), *Medium Performing Democracy* (Indeks 60 - 80) dan *Low Performing Democracy*

(Indeks < 60).

### **12.5. Sumber Data**

IDI dihitung berdasarkan hasil koding koran, koding dokumen, *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara mendalam, Koran yang diambil berdasarkan oplah terbesar. Dokumen merupakan dokumen resmi pemerintah yang berupa undang-undang peraturan daerah, instruksi gubernur atau dokumen tertulis lainnya yang lebih bawah.

### **12.6. Manfaat**

1. Dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi
2. Membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi
3. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
4. Pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengambil langkah-langkah kongkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang.

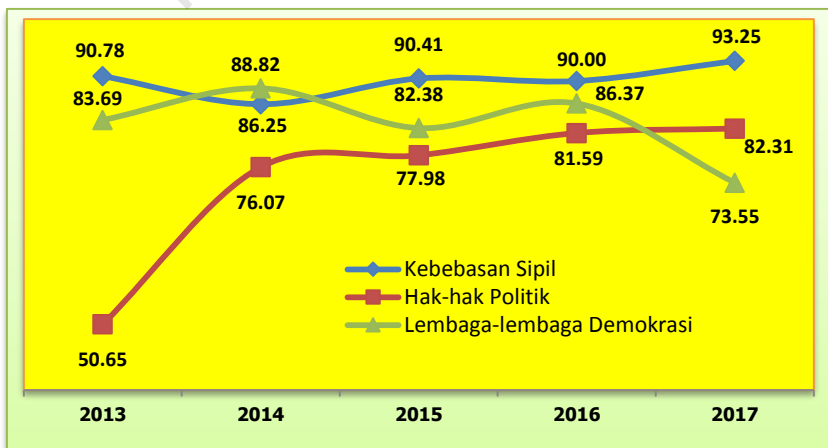
## Ulasan

Mulai tahun 2014, pembangunan demokrasi di D.I. Yogyakarta sudah masuk pada kategori baik. Ini ditunjukkan oleh nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama periode 2014-2017 sudah lebih dari 80. Meski menurun dibandingkan tahun 2016, status IDI Tahun 2017 dengan nilai 83,61 masih berkategori baik.

IDI D.I.  
Yogyakarta  
tahun 2017  
menurun 12,82  
poin persen.

Penurunan IDI ini terutama akibat menurunnya indeks pada aspek Lembaga Demokrasi sebesar 12,82 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga nilai indeks pada tahun 2017 menjadi 73,55. Tidak hanya turun secara nominal, nilai indeks ini juga turun secara kategori. Tahun 2017 adalah untuk kedua kalinya pembangunan demokrasi pada aspek Lembaga Demokrasi menjadi kategori sedang.

**Gambar 12.1**  
**Indeks Demokrasi D.I. Yogyakarta menurut Aspek, Tahun 2017**



Bila dilihat lebih detil, ada tiga variabel di tahun 2017 yang menurun cukup drastis. Variabel kebebasan berpendapat, variabel birokrasi pemerintah daerah dan variabel peradilan yang independen masing-masing turun sebesar 22,21 poin, 33,17 poin dan 37,50 poin. Penurunan variabel-variabel ini merupakan bahan evaluasi pemerintah dalam pembangunan demokrasi dilihat menurut variabel.

Jika dibandingkan dengan angka nasional maupun IDI provinsi lain, tampaknya perkembangan IDI DIY yang berfluktuatif masih dalam kategori wajar dan lebih baik. Meskipun mengalami penurunan, IDI 2017 masih menduduki posisi ke 2 Se\_Indonesia. Perkembangan indeks demokrasi menurut aspek menunjukkan bahwa indeks DIY adalah yang tertinggi Se\_Pulau Jawa kecuali indeks lembaga-lembaga demokrasi. Walaupun demikian, masih ditemukan 5 indikator dengan kategori buruk di tahun 2017. Seperti indikator ancaman datau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dengan indeks hanya mencapai 12,50 dan Indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah dengan indeks 8,33.

**Tabel 12.1**  
**Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), 2013-2017**

Aspek	Wilayah	
	DIY	Indonesia
(1)	(2)	(3)
1 Kebebasan Sipil		
2013	90,78	79,00
2014	86,25	82,62
2015	90,41	80,30
2016	90,00	76,45
2017	93,25	78,75
2 Hak-Hak Politik		
2013	50,65	46,25
2014	76,07	63,72
2015	77,98	70,63
2016	81,59	70,11
2017	82,31	66,63
3 Lembaga-lembaga Demokrasi		
2013	83,69	83,69
2014	88,82	75,81
2015	82,38	66,88
2016	86,37	62,05
2017	73,55	72,49
Indeks Demokrasi Indonesia		
2013	72,36	63,72
2014	82,71	73,04
2015	83,19	72,82
2016	85,58	70,09
2017	83,61	72,11

Sumber : Berita Resmi Statistik

**Tabel 12.2**  
**Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), 2016-2017**

Aspek/Variabel	2016		2017	
	DIY	Indonesia	DIY	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1 Kebebasan Sipil</b>				
1.1 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	95,31	82,79	100,00	79,16
1.2 Kebebasan Berpendapat	83,30	72,17	61,09	65,97
1.3 Kebebasan Berkeyakinan	94,24	81,69	94,63	84,28
1.4 Kebebasan Dari Diskriminasi	80,40	87,43	100,00	90,74
<b>2 Hak-Hak Politik</b>				
2.1 Hak Memilih dan Dipilih	77,62	75,26	78,20	75,55
2.2 Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	85,57	61,24	86,41	56,16
<b>3 Lembaga-lembaga Demokrasi</b>				
3.1 Pemilu yang Bebas dan Adil	97,47	95,48	97,47	95,48
3.2 Peran DPRD	63,00	46,76	79,33	59,78
3.3 Peran Partai Politik	100,00	52,29	100,00	71,64
3.4 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	73,77	47,51	40,60	56,26
3.5 Peran peradilan yang independe	100,00	91,36	62,50	86,31
<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b>	<b>85,58</b>	<b>70,09</b>	<b>83,61</b>	<b>72,11</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik

**Tabel 12.3**  
**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi di**  
**Pulau Jawa, 2015-2016**

Provinsi	2016				2017			
	Aspek			IDI	Aspek			IDI
	Kebeba- san Sipil	Hak- hak Politik	Lembaga Demokrasi		Kebeba- san Sipil	Hak- hak Politik	Lembaga Demokra- si	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DKI Jakarta	81,11	67,54	63,19	70,85	87,73	80,86	87,12	84,73
Jawa Barat	73,37	72,34	49,79	66,82	73,61	71,02	59,16	68,78
Jawa	66,06	67,24	66,69	66,71	69,07	67,24	78,82	70,85
DIY	90,00	81,59	86,37	85,58	93,25	82,31	73,55	83,61
Jawa Timur	73,73	76,49	63,63	72,24	78,98	60,98	76,57	70,92
Banten	83,47	68,30	60,99	71,36	85,16	63,87	74,98	73,72
Indonesia	76,45	70,11	62,05	70,09	78,75	66,63	72,49	72,11

Sumber: Berita Resmi Statistik



### 13.1. Konsep dan Defnisi

Rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi pengeluaran makanan dan non Makanan

### 13.2. Manfaat

Data konsumsi dan pengeluaran digunakan untuk:

- Mengukur tingkat kesejahteraan
- Mengukur tingkat ketahanan pangan
- Mengukur Kerawanan Pangan
- Mengukur pola konsumsi dan tingkat keragaman konsumsi pangan
- Mengukur indeks gini rasio
- Dasar penghitungan penduduk miskin.

### Interpretasi

- Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan protein (AKP) bagi penduduk Indonesia saat ini (WNPG 2004), diperoleh rata-rata AKE dan AKP nasional pada tingkat konsumsi masing-masing adalah 2000 kkal dan 52 gr perkapita perhari.
- Kategori tingkat kecukupan energi menurut Departemen Kesehatan 1996: Sangat rawan pangan (<70% AKE), Rawan pangan (70%-89,9% AKE), Tahan pangan (90%-119,9% AKE) dan Melebihi AKE ( $\geq 120\%$  AKE).

- Kategori tingkat kecukupan protein menurut Departemen Kesehatan 1990: Defisit (<70% AKP), Kurang (70%-80% AKP), Sedang (80%-99% AKP) dan Baik ( $\geq$ 100% AKP).

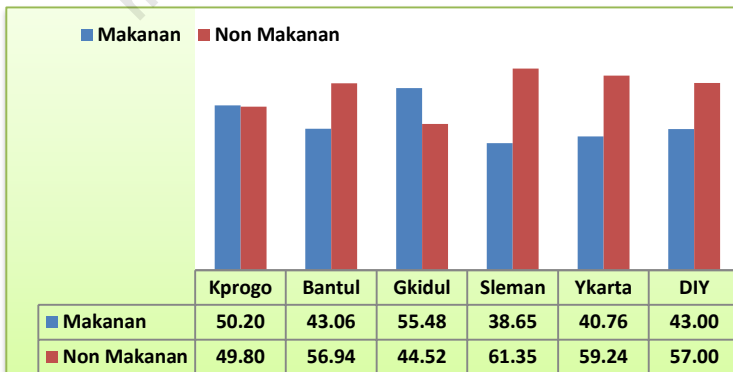
<https://yogyakarta.bps.go.id>

## Ulasan

Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk dapat bertahan hidup secara sehat. Seseorang akan mengalokasikan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan makanan terlebih dahulu, baru mengalokasikan untuk pengeluaran non makanan. Periode tahun 2017, pola pengeluaran D.I. Yogyakarta tidak berbeda dengan tahun 2016. Pengeluaran non makanan lebih rendah daripada makanan yakni 43,00 persen dan 57,00 persen. Pola yang sama juga terjadi di semua kabupaten/kota. Pengeluaran non makanan tertinggi adalah di Kabupaten Sleman (61,35 persen) dan terendah di Kabupaten Gunungkidul(44,52%). Sesuai teori Ernst Engel, menandakan bahwa Kabupaten Sleman paling sejahtera dibandingkan lima kabupaten/kota lainnya.

Konsumsi Kalori dan Protein D.I. Yogyakarta telah memenuhi standar gizi

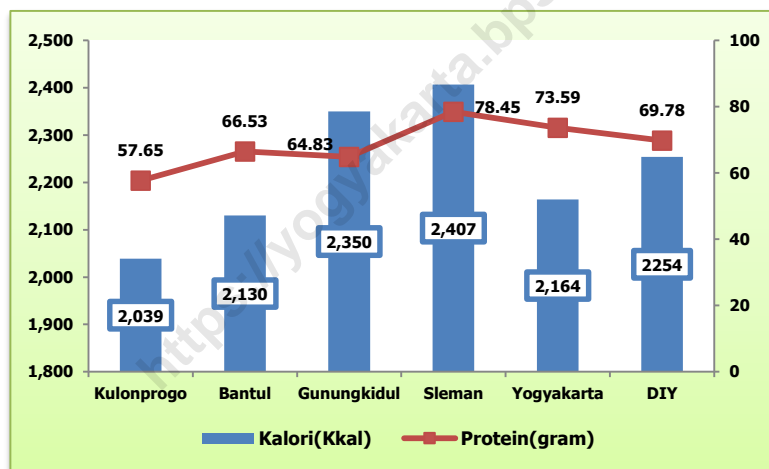
**Gambar 13.1.**  
**Persentase Rata-rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan, 2017**



Sementara proporsi pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga masih mendominasi rata-rata pengeluaran perkapita tahun 2017 baik

di level provinsi maupun di semua kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran perkapita D.I. Yogyakarta tercatat Rp.843.280,00, sementara 32,32 persen diantaranya dialokasikan untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga. Posisi berikutnya adalah pengeluaran makanan dan minuman jadi(23,22 persen) serta barang dan jasa(21,63 persen). Sementara pengeluaran selain kelompok komodite-komodite tersebut ada pada kisaran 0 persen hingga 12 persen.

**Gambar 13.2.**  
**Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein perkapita per Hari, 2017**



Selain pola pengeluaran, memperhatikan pola konsumsi pangan begitu penting. Pola konsumsi pangan menjadi salah satu faktor penentu tingkat kesehatan dan produktifitas rumah tangga. Suatu rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang sehat adalah bila mengkonsumsi makanan yang bergizi, memenuhi standar minimum yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah cukup kalori dan protein. Rata-rata konsumsi kalori dan protein perkapita D.I. Yogyakarta tahun 2017 mencapai 2.254 KKal/hari dan 69,78 gram/hari. Artinya berdasarkan standar kecukupan konsumsi kalori

dan protein per kapita sehari (WNPG X tahun 2012), yaitu 2.150 kkal dan 57 gram protein, maka rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk D.I. Yogyakarta pada Maret 2017 sudah di atas standar kecukupan. Kecukupan standar gizi ini tidak demikian bila ditinjau menurut sebaran angka kabupaten/kota. Penduduk di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta telah mengkonsumsi kalori dan protein di atas standar kecukupan. Sementara dua kabupaten lainnya untuk konsumsi protein masih dibawah standar asupan gizi yang ditentukan.

Ditinjau menurut kelompok pengeluaran, konsumsi kalori mayoritas berasal dari padi-padian(32,12 persen) diikuti oleh makanan dan minuman(32,05 persen) dan posisi ketiga minyak dan kelapa(10,18 persen). Pola konsumsi protein hampir sama dengan konsumsi kalori. Konsumsi protein didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman jadi (39,10 persen), padi-padian (24,41 persen) serta ketiga adalah kelompok kacang-kacangan(9,97 persen). Hal ini dapat dipahami bahwa umumnya tumpuan konsumsi kalori adalah bahan makanan dari sumber karbohidrat, akan tetapi konsumsi protein perlu digalakkan seperti konsumsi protein hewani mengingat komodite ini dibutuhkan dalam konsumsi pangan ideal (PPH-Pola Pangan Harapan) disamping sebagai sumber stamina untuk meningkatkan produktifitas.

**Tabel 13.1**  
**Pengeluaran Rumah Tangga menurut Kab/Kota, Makanan dan Non Makanan di D.I. Yogyakarta Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Rupiah)**

Kabupaten/ kota	Makanan		Non Makanan		Total	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	330 899	361 910	388 290	358 996	719 189	720 906
Bantul	405 318	441 231	569 924	583 376	975 242	1 024 607
Gunungkidul	353 769	423 594	317 346	339 852	671 115	763 446
Sleman	510 287	585 292	869 552	929 168	1 379 839	1 514 460
Yogyakarta	527 512	580 257	937 891	843 280	1 465 403	1 423 537
DIY	434 004	490 249	636 958	649 918	1 070 962	1 140 166

Sumber: Susenas 2016-2017 diolah

**Tabel 13.2.**  
**Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kabupaten/kota dan Jenis Makanan, Tahun 2016 dan Tahun 2017**

Kabupaten/kota	Makanan		Non Makanan	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	46,01	50,20	53,99	49,80
Bantul	41,56	43,06	58,44	56,94
Gunungkidul	52,71	55,48	47,29	44,52
Sleman	36,98	38,65	63,02	61,35
Yogyakarta	36,00	40,76	64,00	59,24
<b>DIY</b>	<b>40,52</b>	<b>43,00</b>	<b>59,48</b>	<b>57,00</b>

Sumber: Susenas 2016-2017 diolah

**Tabel 13.3.**  
**Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut**  
**Kelompok Makanan dan Kabupaten/kota, 2017 (Persen)**

No	Kelompok Makanan	Kabupaten/kota					DIY
		Kprogo	Bantul	Gnkidul	Sleman	Yogya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi-padian	45 993	44 208	61 259	44 566	38 674	47 207
2	Umbi-Umbian	3 466	2 814	3 923	4 749	2 993	3 736
3	Ikan/udang/ cumi/ kerang	13 768	17 359	18 586	27 556	18 104	20 514
4	Daging	14 664	25 438	20 569	31 086	24 857	25 014
5	Telur dan susu	21 924	36 545	24 783	41 947	36 933	34 384
6	Sayur-sayuran	32 970	32 741	46 154	44 012	30 621	38 705
7	Kacang- kacangan	10 524	10 149	15 129	11 229	9 974	11 480
8	Buah-buahan	16 268	23 538	20 260	33 049	25 496	25 326
9	Minyak dan lemak	11 890	10 402	15 958	12 385	9 231	12 144
10	Bahan Minuman	17 987	16 521	20 221	21 175	17 785	19 021
11	Bumbu-bumbuan	4 666	7 279	7 234	8 336	5 617	7 126
12	Konsumsi lainnya	7 171	9 955	10 822	9 904	8 717	9 656
13	Makanan dan minuman jadi	126 491	165 368	116 138	251 708	316 346	195 819
14	Tembakau dan sirih	34 128	38 914	42 558	43 590	34 907	40 118
<b>Total</b>		<b>361 910</b>	<b>441.231</b>	<b>423 594</b>	<b>585 292</b>	<b>580 257</b>	<b>490 249</b>

Sumber: Susenas 2017 diolah

**Tabel 13.4.**  
**Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut**  
**Kelompok Non Makanan dan Kabupaten/kota, 2017 (Persen)**

No	Kelompok Non Makanan	Kabupaten/kota					DIY
		Kprogo	Bantul	Gnkidul	Sleman	Yogya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	138 455	250 585	153 740	378 256	364 567	272 554
2	Barang dan jasa	82 249	151 625	89 028	275 799	251 981	182 383
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	18 007	25 635	15 832	43 202	43 315	30 439
4	Barang-barang yang tahan lama	88 092	100 759	41 280	136 854	122 533	101 702
5	Pajak dan Asuransi	21 075	40 355	22 696	67 128	42 372	43 492
6	Keperluan Pesta dan Upacara	11 117	14 417	17 275	27 929	18 512	19 348
Total		358 996	583 376	339 852	929 168	843 280	843 280

Sumber: Susenas 2017 diolah

**Tabel 13.5.**  
**Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein perkapita perhari menurut**  
**Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta**  
**Tahun 2016 dan 2017**

No	Kabupaten/ kota	Kalori(Kkal)		Protein(gram)	
		2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kulonprogo	1 907	2 039	51,75	57,65
2	Bantul	1 974	2 130	59,52	66,53
3	Gunungkidul	2 074	2 350	56,15	64,83
4	Sleman	2 211	2 407	68,48	78,45
5	Yogyakarta	1 995	2 164	67,27	73,59
<b>DIY</b>		<b>2 063</b>	<b>2 254</b>	<b>61,71</b>	<b>69,78</b>

Sumber: Susenas 2015-2016 diolah

**Tabel 13.6.**  
**Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sebulan menurut Kelompok**  
**Makanan dan Kabupaten/kota, 2017 (Kkal)**

No	Kelompok Makanan	Kabupaten/kota					DIY
		Kprogo	Bantul	Gnkidul	Sleman	Yogya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi-padian	775	681	937	666	573	724
2	Umbi-Umbian	59	25	72	40	18	42
3	Ikan/udang/ cumi/ kerang	14	23	29	30	20	25
4	Daging	54	80	69	88	66	76
5	Telur dan susu	53	80	54	81	71	71
6	Sayur-sayuran	37	39	43	43	26	39
7	Kacang- kacangan	66	67	98	69	56	72
8	Buah-buahan	65	59	59	72	52	63
9	Minyak dan lemak	226	213	301	224	165	229
10	Bahan Minuman	113	113	131	127	95	119
11	Bumbu-bumbuan	6	10	11	10	4	9
12	Konsumsi lainnya	52	63	69	60	56	61
13	Makanan dan minuman jadi	519	678	476	897	963	723
14	Tembakau dan sirih	0	0	0	0	0	0
Total		2.039	2.130	2.350	2.407	2.164	2.254

Sumber: Susenas 2017 diolah

**Tabel 13.7.**  
**Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan dan Kabupaten/kota, 2017 (gram)**

No	Kelompok Makanan	Kabupaten/kota					DIY
		Kprogo	Bantul	Gnkidul	Sleman	Yogya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi-padian	18,23	16,02	22,00	15,70	13,45	17,04
2	Umbi-Umbian	0,49	0,26	0,46	0,40	0,19	0,36
3	Ikan/udang/ cumi/ kerang	2,25	3,35	4,09	4,54	2,91	3,70
4	Daging	3,24	4,85	4,29	5,40	4,03	4,64
5	Telur dan susu	2,94	4,40	3,07	4,51	3,92	3,96
6	Sayur-sayuran	2,49	2,41	2,75	2,75	1,56	2,50
7	Kacang- kacangan	6,34	6,38	9,32	6,79	5,33	6,96
8	Buah-buahan	0,63	0,59	0,55	0,74	0,52	0,63
9	Minyak dan lemak	0,47	0,26	0,36	0,22	0,11	0,27
10	Bahan Minuman	0,78	0,87	1,14	0,92	0,62	0,90
11	Bumbu-bumbuan	0,25	0,40	0,42	0,40	0,21	0,37
12	Konsumsi lainnya	1,01	1,21	1,28	1,16	1,14	1,18
13	Makanan dan minuman jadi	18,54	25,53	15,10	34,92	39,60	27,28
14	Tembakau dan sirih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		57,65	66,53	64,83	78,45	73,59	69,78

Sumber: Susenas 2017 diolah



# Indikator Lainnya

## Indeks Pembangunan Gender (IPG)

94.15

94.31

94.41

94.27

94.39

## Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

76.36

66.9

68.75

66.96

69.37

2013

2014

2015

2016

2017

IPG terendah (84,03)

IDG terendah (61,99)

Disparitas gender menyempit

**namun**

pemberdayaan gender masih rendah



## INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI(IPAK)

### Konsep dan Definisi

IPAK dibangun dari dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Dimensi persepsi dibangun dari sub dimensi keluarga, komunitas, dan publik. Dimensi pengalaman dibangun dari sub dimensi pengalaman publik dan pengalaman lainnya. Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). SPAK hanya mengukur perilaku masyarakat yang termasuk tindakan perilaku korupsi skala kecil (*petty corruption*). Variabel penyusun IPAK dipilih dari sejumlah pertanyaan dengan menggunakan *Explanatory Factor Analysis (EFA)*.

### Interpretasi

Kategorisasi nilai indeks adalah:

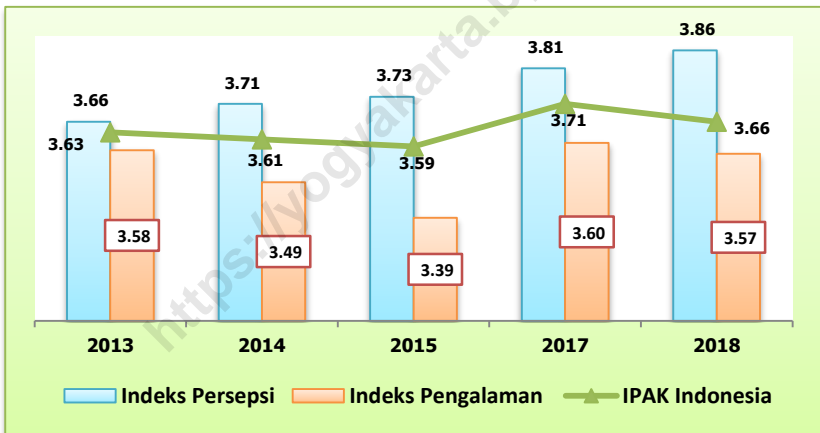
Nilai IPAK	Makna Indeks
(1)	(2)
0–1,25	Sangat Permisif
1,26–2,50	Permisif
2,51–3,75	Anti Korupsi
3,76–5,00	Sangat Anti Korupsi

Nilai IPAK yang semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya *zero tolerance* terhadap korupsi semakin melekat dan mewujudkan dalam perilaku masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

## Ulasan

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2017 mencapai 3,66 atau lebih rendah 0,05 dibandingkan nilai IPAK tahun sebelumnya. Ini berarti perilaku masyarakat untuk anti korupsi tahun 2017 sedikit lebih buruk daripada tahun 2016. Ini ditandai dengan angka IPAK yang menjauhi dari skor 5. Namun demikian, besaran IPAK tahun 2017 masih lebih baik dari angka IPAK tahun 2012-2015.

**Gambar 14.1**  
**Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2013-2017**



Bila dilihat menurut dimensi, nampak bahwa indeks persepsi selalu lebih besar dari pada indeks pengalaman. Sementara ditinjau dari perkembangannya indeks dimensi persepsi meningkat sepanjang tahun, sedangkan indeks pengalaman berfluktuasi. Untuk tahun 2017, indeks persepsi mengalami peningkatan dari 3,81 menjadi 3,86 pada tahun 2017, sementara itu indeks pengalaman menurun dari 3,60 menjadi 3,57. Ini menandakan bahwa persepsi masyarakat tentang berperilaku anti korupsi semakin baik, akan tetapi dari sisi pengalaman tentang perilaku anti korupsi

tidak lebih baik daripada tahun 2016.

Berdasarkan karakteristik rumah tangga, semua nilai IPAK tahun 2017 menurun dibandingkan pada tahun 2016. Ditinjau menurut wilayah tempat tinggal IPAK perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. IPAK menurut wilayah tempat tinggal, terlihat bahwa Nilai IPAK Perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan yakni 3,81 dan 3,47. Sementara dari karakteristik jenjang pendidikan tertinggi memperlihatkan semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka semakin berperilaku anti korupsi. Selanjutnya pada kelompok umur 40-59 tahun, nilai IPAK selalu menjadi yang tertinggi disusul oleh kelompok umur kurang dari 40 tahun. IPAK pada kelompok umur 60 tahun keatas adalah yang terendah.

**Tabel 14.1**  
**Nilai IPAK Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>IPAK</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
2013	3,63
2014	3,61
2015	3,59
2017	3,71
2018	3,66

Sumber: Berita Resmi Statistik

**Tabel 14.2**  
**Indeks menurut Dimensi, Tahun 2013-2018**

<b>Sumber Keterangan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Indeks Persepsi	3,66	3,71	3,73	3,81	3,86
Indeks Pengalaman	3,58	3,49	3,39	3,60	3,57
<b>IPAK Indonesia</b>	<b>3,63</b>	<b>3,61</b>	<b>3,59</b>	<b>3,71</b>	<b>3,66</b>

Sumber: Berita Resmi Statistik

**Tabel 14.3**  
**Perbandingan IPAK 2013-2018 Berdasarkan Karakteristik Tertentu**

<b>Karakteristik</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia	<b>3,63</b>	<b>3,61</b>	<b>3,59</b>	<b>3,71</b>	<b>3,66</b>
Klasifikasi Wilayah					
Perkotaan	3,71	3,71	3,71	3,86	3,81
Pedesaan	3,55	3,51	3,46	3,53	3,47
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	3,66	3,64	3,63	*)	*)
Perempuan	3,60	3,59	3,55	*)	*)
U mur (Tahun)					
Kurang dari 40	3,63	3,63	3,59	3,71	3,65
40 sampai 59	3,65	3,64	3,62	3,74	3,70
60 atau lebih	3,55	3,54	3,49	3,62	3,56
Pendidikan Tertinggi					
SLTP ke bawah	3,55	3,52	3,49	3,58	3,53
SLTA	3,82	3,85	3,80	3,99	3,94
Di atas SLTA	3,94	4,01	4,00	4,09	4,02

Sumber: Berita Resmi Statistik  
Catatan: Data tidak tersedia



## INDEKS KEBAHAGIAAN

### Konsep dan Definisi

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Pada tahun 2014 diukur hanya dari dimensi tingkat kepuasan Hidup terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap:

- 1) kesehatan,
- 2) pendidikan,
- 3) pekerjaan,
- 4) pendapatan rumah tangga,
- 5) keharmonisan keluarga,
- 6) ketersediaan waktu luang,
- 7) hubungan sosial,
- 8) kondisi rumah dan aset,
- 9) keadaan lingkungan, dan
- 10) kondisi keamanan.

Pada tahun 2017, indeks tersebut dipengaruhi oleh tiga dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan yaitu:

- (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup, dengan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial;
- (2) Indeks Dimensi Perasaan (*Affect*); dan
- (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia).

Seluruh indeks diukur pada skala 0-100. Masing-masing dimensi memiliki kontribusi terhadap Indeks Kebahagiaan sebagai berikut: Kepuasan Hidup 34,80 persen (Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, masing-masing 50 persen), Perasaan (*Affect*) 31,18 persen, dan Makna Hidup (Eudaimonia) 34,02 persen.

## Penghitungan

Setiap aspek kehidupan memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda terhadap indeks kebahagiaan. Semakin besar kontribusi suatu aspek kehidupan, menunjukkan semakin penting aspek tersebut bagi indeks kebahagiaan. Tiga aspek kehidupan yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah pendapatan rumah tangga (14,64 persen), kondisi rumah dan aset (13,22 persen), serta pekerjaan (13,12 persen).

$$IK_{prov} = \sum_j \sum_i \frac{b_i x_{ij}}{m}$$

dengan:

- $b_i$  : Nilai bobot untuk variabel ke- $i$ , merupakan *loading factor* yang dihasilkan dari metode analisis faktor
- $x_{ij}$  : Nilai variabel ke- $i$  untuk ruta ke- $j$
- $m$  : Jumlah seluruh ruta  $IK_{prov}$

## **Interpretasi**

Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia dan semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan/kepuasan hidup yang tinggi menunjukkan kemajuan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan telah berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan subjektif.

## **Sumber Data**

Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

<https://yogyakarta.bps.go.id>

## Ulasan

Indeks kebahagiaan D.I. Yogyakarta tahun 2017 mencapai 72,93 lebih tinggi daripada tahun 2016. Tabel 4 memuat nilai Indeks kebahagiaan menurut karakteristik demografi. Terlihat bahwa penduduk yang tinggal di perkotaan, berjenis kelamin laki-laki, belum menikah, usia antara 17-24 tahun lebih bahagia.

Kemampuan berfikir dan menyelesaikan persoalan bagi mereka yang berpendidikan lebih tinggi mendorong mereka merasakan lebih bahagia daripada berpendidikan lebih rendah. Indeks kebahagiaan menurut tingkat pendidikan memperlihatkan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai indeks paling rendah (68,54), sedang penduduk dengan tingkat pendidikan S2 atau S3 (80,62) tertinggi indeks kebahagiaannya.

Selain itu dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah tangga maka semakin tinggi indeks kebahagiaannya. Kondisi ekonomi yang sudah mapan dan berkecukupan membuat seseorang lebih rilex dalam menyikapi semua kesulitan dalam kehidupannya. Ini ditandai oleh penduduk dengan tingkat pendapatan lebih dari 7,2 juta rupiah per bulan, indeks kebahagiaannya mencapai 77,11 sementara pada tingkat pendapatan 1,8 juta rupiah ke bawah indeks kebahagiaannya hanya 69,35.

Seperti tahun 2016, indeks kebahagiaan D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 masih yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa sementara yang terendah adalah Provinsi Jawa Barat. Indeks kebahagiaan D.I. Yogyakarta tahun 2017 sebesar 72,93 sementara Provinsi Jawa Barat mempunyai Indeks kebahagiaan 69,58.

**Tabel 14.4**  
**Indeks Kebahagiaan menurut Karakteristik Demografi**  
**D.I. Yogyakarta, 2014-2017**

Karakteristik Demografi	Indeks Kabahagiaan	
	2014	2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
<b>Indeks Kabahagiaan</b>	70,77	72,93
<b>Klasifikasi Wilayah:</b>		
Perkotaan	72,16	73,22
Perdesaan	67,79	72,16
<b>Jenis Kelamin:</b>		
Laki-laki	70,57	73,22
Perempuan	70,92	72,66
<b>Status Perkawinan:</b>		
Belum Menikah	72,62	75,39
Menikah	70,77	72,80
Cerai Hidup	69,58	69,62
Cerai Mati	69,24	72,51
<b>Kelompok Umur:</b>		
17 – 24 Tahun	73,72	75,69
25 – 40 Tahun	71,78	72,97
41 – 64 Tahun	70,27	72,76
65 Tahun Ke Atas	69,34	72,12

Sumber: Berita Resmi Statistik

**Tabel 14.5**  
**Indeks Kebahagiaan menurut Pendidikan Tertinggi yang**  
**Ditamatkan D.I. Yogyakarta, 2014-2017**

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Indeks Kabahagiaan	
	2014	2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Tidak/Belum Pernah Sekolah	64,80	68,54
Tidak Tamat SD/MI/SDLB/Paket	69,44	69,53
SD Sederajat	68,03	70,40
SMP Sederajat	70,53	71,39
SMA Sederajat	71,77	73,85
Diploma I/II/III	74,86	77,37
Diploma IV/S1	76,66	77,40
S2 Atau S3	79,96	80,62

Sumber: Berita Resmi Statistik

**Tabel 14.6**  
**Indeks Kebahagiaan menurut Pendapatan Rumah Tangga**  
**D.I. Yogyakarta, 2014-2017**

Pendapatan Rumah Tangga	Indeks Kabahagiaan	
	2014	2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Hingga Rp 1,800,000	68,15	69,35
Rp 1,800,001 - Rp 3,000,000	70,98	72,35
Rp 3,000,001 - Rp 4,800,000	73,73	73,99
Rp 4,800,001 - Rp 7,200,000	76,36	77,49
Lebih Dari Rp, 7,200,000	76,63	77,11

Sumber: Berita Resmi Statistik

**Tabel 14.7**  
**Indeks Kebahagiaan dan Dimensi Penyusunnya Menurut Provinsi**  
**di Pulau Jawa Tahun 2017**

Provinsi	Indeks Kebahagiaan	Penyusunan Indeks Kebahagiaan				Indeks Dimensi Makna Hidup ( <i>Eudaimonia</i> )
		Indeks Kepuasan Hidup		Total	Indeks Dimensi Perasaan ( <i>Affect</i> )	
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal	Sosial			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	71,33	68,64	74,56	71,60	68,06	74,04
Jawa Barat	69,58	65,48	74,96	71,60	66,83	71,42
Jawa Tengah	70,92	65,50	76,34	70,22	70,45	71,36
DIY	72,93	67,95	76,02	70,92	73,38	73,49
Jawa Timur	70,77	66,63	76,72	71,98	68,79	71,66
Banten	69,83	65,78	74,97	71,68	67,80	71,13
Indonesia	70,69	65,98	76,16	71,07	68,59	72,23

Sumber: Berita Resmi Statistik

**Tabel 14.8**  
**Indeks Kabahagian menurut Klasifikasi Wilayah dan Provinsi di**  
**Pulau Jawa, 2017**

Provinsi	Klasifikasi Wilayah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI Jakarta	71,33		71,33
Jawa Barat	70,08	68,23	69,58
Jawa Tengah	71,93	69,98	70,92
DIY	73,22	72,16	72,93
Jawa Timur*)			70,77
Banten	70,36	68,50	69,83
<b>Indonesia</b>	<b>71,64</b>	<b>69,57</b>	<b>70,69</b>

Sumber: Berita Resmi Statistik

\*) : Data belum tersedia

## INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

*Sustainable Development Goals (SDG's)* menempatkan isu gender dalam agenda pembangunan tujuan ke 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari data-data gender, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indikator untuk mengukur capaian pembangunan gender.

### Konsep dan Definisi

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. Penghitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan.

### Penghitungan

IPG pada tahun 2014 menggunakan metode baru, dimensi yang digunakan masih sama dengan dimensi penghitungan IPM, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator yang digunakan adalah angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, PNB Perkapita.

**IPG** merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Dengan menggunakan IPG dapat diketahui perbedaan capaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin mendekati angka IPG 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator diatas dihitung berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun keatas. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun keatas.

### **Interpretasi**

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

### **Sumber Data**

Susenas, Sakernas, Supas dan Sensus Penduduk.

### **Manfaat**

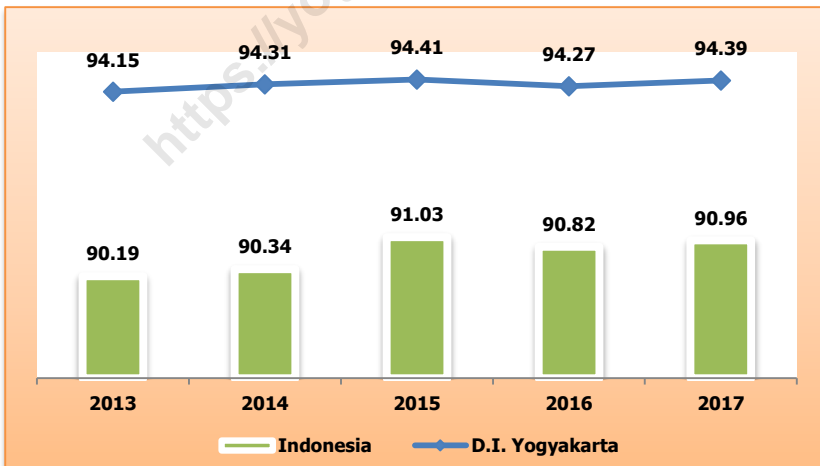
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

## ULASAN SINGKAT

Pembangunan gender di D.I. Yogyakarta dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahun. IPG D.I. Yogyakarta selama kurun waktu 2013-2017 telah meningkat dari 94,15 pada tahun 2013 menjadi 94,39 pada tahun 2017. Artinya hasil pembangunan untuk laki-laki dan perempuan semakin setara. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil. Peningkatan peningkatan terjadi akibat adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

IPG D.I.  
Yogyakarta  
2013-2017  
lebih tinggi  
dari Nasional

**Gambar 14.2.**  
**Indeks Pembangunan Gender 2013-2017**



Gambaran pembangunan manusia tersebut sedikit berbeda untuk Kota Yogyakarta. Setelah meningkat pada tahun 2014, IPG Kota Yogyakarta cenderung menurun, hingga pada tahun 2017 tercatat sebesar 98,26. Selain

itu disparitas capaian pembangunan gender tampak pada IPG Kabupaten Gunungkidul dan kabupaten/kota lainnya. IPG Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 tercatat sebesar 84,03, sementara IPG kabupaten/kota lainnya telah mencapai angka diatas 90. Kurangnya infrastruktur yang mendukung, kendala geografis yang sulit serta terbatasnya sumber daya manusia disinyalir sebagai masalah utama dalam pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Disandingkan dengan Provinsi se-Pulau Jawa, IPG D.I. Yogyakarta tahun 2013-2017 masih menduduki peringkat ke-2. Sementara nilai IPG DKI Jakarta yaitu sebesar 94,70 menduduki posisi tertinggi dan posisi terendah adalah Provinsi Jawa Barat yakni mencapai 89,18. Komposisi ini sejalan dengan komposisi peringkat IPM Provinsi Se-Pulau Jawa.

Menurut komponen, besaran AHH D.I. Yogyakarta menunjukkan adanya perbedaan level capaian antara AHH perempuan dan laki-laki. Level AHH penduduk laki-laki lebih rendah sekitar 4 tahun dibanding level AHH penduduk perempuan. Hal serupa juga terjadi di semua kabupaten/kota. Ukuran derajat kesehatan masyarakat ini cukup menggembirakan, dimana AHH D.I. Yogyakarta lebih tinggi dari nasional baik laki-laki maupun perempuan.

Komponen berikutnya adalah dari sisi capaian pembangunan pendidikan. Ada dua indikator yakni HLS menggambarkan keberhasilan pendidikan jangka pendek dan Rata-rata lama sekolah(RLS) menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Indikator berikutnya Harapan Lama Sekolah (HLS) . Angka tersebut menggambarkan tentang peluang penduduk yang baru memasuki sekolah (7 tahun) untuk terus sekolah. Pada tahun 2017, HLS laki-laki hampir sama dengan perempuan yakni masing-masing sebesar 15,54 dan 15,14. Angka HLS tersebut menunjukkan adanya kesetaraan gender dimana harapan lama sekolah laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang hampir sama untuk melanjutkan sekolah

selama 15 tahun ke depan. Kondisi tersebut hampir sama untuk kabupaten/kota. Namun demikian, selisih HLS Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta terpaut 4 tahun.

Capaian pembangunan pendidikan dari rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa RLS D.I. Yogyakarta antara laki-laki lebih tinggi 1 poin daripada perempuan. Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,74 tahun atau setara 3 SMP, sedangkan untuk perempuan memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,72 atau setara 2 SMP. Meskipun rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun harapan lama sekolah perempuan relatif sama dengan laki-laki. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Kesenjangan jelas terlihat dari besaran pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin. Tahun 2017, pengeluaran perkapita laki-laki D.I Yogyakarta sebesar 16.119 ribu rupiah sementara perempuan sebesar 12.801 ribu rupiah. Gap ini juga terjadi di semua kabupaten/kota. Tertinggi adalah di Kabupaten Gunungkidul dimana pengeluaran perkapita laki-laki sebesar 14.503 ribu rupiah sementara pengeluaran perkapita perempuan hanya mencapai 6.010 ribu rupiah. Sementara sama seperti komponen lainnya, lagi-lagi gap terkecil pendapatan perkapita adalah di Kota Yogyakarta. Pengeluaran perkapita laki-laki di wilayah ini mencapai 17.997 ribu rupiah dan pengeluaran perkapita perempuan 18.282 ribu rupiah. Berbeda dengan kabupaten/kota lainnya Pengeluaran perkapita laki-laki justru lebih rendah dari perempuan.

**Tabel 14.9**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/kota di**  
**D.I. Yogyakarta, 2013-2017**

<b>Kabupaten/ kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Kulonprogo	94,23	94,65	94,78	94,93
Bantul	94,33	94,41	94,42	94,98
Gunungkidul	81,76	82,27	83,10	84,03
Sleman	95,50	96,09	96,08	95,62
Yogyakarta	98,48	99,27	98,78	98,26
<b>DIY</b>	<b>94,15</b>	<b>94,31</b>	<b>94,41</b>	<b>94,39</b>

Catatan: IPG Kabupaten/kota Tahun 2017 tidak tersedia

**Tabel 14.10**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi**  
**di Pulau Jawa, 2013-2017**

<b>Provinsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
DKI Jakarta	94,26	94,60	94,72	94,98	94,70
Jawa Barat	88,21	88,35	89,11	89,56	89,18
Jawa Tengah	91,50	91,89	92,21	92,22	91,94
D.I. Yogyakarta	94,15	94,31	94,41	94,27	94,39
Jawa Timur	90,22	90,83	91,07	90,72	90,76
Banten	90,31	90,99	91,11	90,97	91,14
<b>Indonesia</b>	<b>90,19</b>	<b>90,34</b>	<b>91,03</b>	<b>90,82</b>	<b>90,96</b>

**Tabel 14.11**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Komponen di**  
**D.I. Yogyakarta, 2017**

Kabupaten/ kota	AHH(tahun)		HLS(tahun)		RLS (tahun)	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	73,19	77,00	13,92	15,20	9,12	8,22
Bantul	71,62	75,39	15,10	14,54	9,69	8,79
Gunungkidul	71,89	75,64	13,12	12,72	7,74	6,33
Sleman	72,74	76,53	16,59	15,97	11,30	10,14
Yogyakarta	72,45	76,24	16,84	16,79	11,78	10,91
DIY	72,95	76,57	15,54	15,14	9,74	8,73
<b>Indonesia</b>	<b>69.16</b>	<b>71.83</b>	<b>12.78</b>	<b>11.37</b>	<b>8.56</b>	<b>6.89</b>

**Tabel 14.11**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Komponen di**  
**D.I. Yogyakarta, 2017**

*Lanjutan*

Kabupaten/ kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	12.261	8.801	76,74	72,85	94,93
Bantul	17.350	14.372	81,31	77,23	94,98
Gunungkidul	14.503	6.010	75,15	63,15	84,03
Sleman	16.334	14.515	84,62	80,91	95,62
Yogyakarta	17.997	18.282	86,21	84,71	98,26
DIY	16.119	12.801	81,77	77,18	94,39
<b>Indonesia</b>	<b>14.932</b>	<b>8.752</b>	<b>74.85</b>	<b>63.43</b>	<b>90,96</b>



## **INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)**

**Indeks pembagunan gender (IDG)** memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi an pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi atau dimensi IDG.

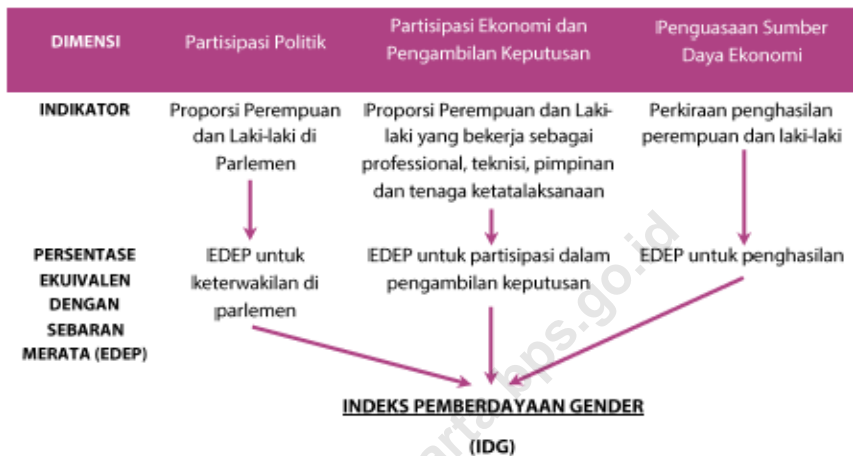
### **Konsep dan Definisi**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam partisipasi politik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan.

### **Penghitungan**

IDG adalah rata-rata dari tiga indeks yaitu indeks keterwakilan departemen, indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan. Terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Penghitungan pendapatan untuk IDG sama dengan IPG. Dimensi IPG dan penghitungan IPG seperti bagan dibawah ini.

## Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



### 1. Penyusunan Indeks

Indeks keterwakilan di parlemen ( $I_{par}$ )

$$EDEP_{(par)} = \{(X_f)(Y_f) - 1 + (X_m)(Y_m) - 1\} - 1$$

dan

$$I_{(par)} = \{EDEP_{(par)}\} / 50$$

dimana,

$X_f$  = proporsi penduduk perempuan

$X_m$  = proporsi penduduk laki-laki

$Y_f$  = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

$Y_m$  = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

## 2. Indeks pengambilan keputusan (IDM)

$$EDEP_{(IDM)} = \{ (X_f)(Z_f) - 1 + (X_m)(Z_m) - 1 \} - 1$$

dan

$$I_{(IDM)} = \{ EDEP_{(IDM)} \} / 50$$

dimana,

$Z_f$  = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

$Z_m$  = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

## 3. Indeks distribusi pendapatan ( $I_{inc-dis}$ )

Sebagaimana disajikan pada penghitungan IPG di atas.

## 4. Indeks pemberdayaan gender

$$IDG = 1/3 (I_{(par)} + I_{(IDM)} + I_{inc-dis})$$

### Interpretasi

Nilainya berkisar antara 0-100 persen, Semakin tinggi nilai IDG maka perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau semakin sempurna pemberdayaannya.

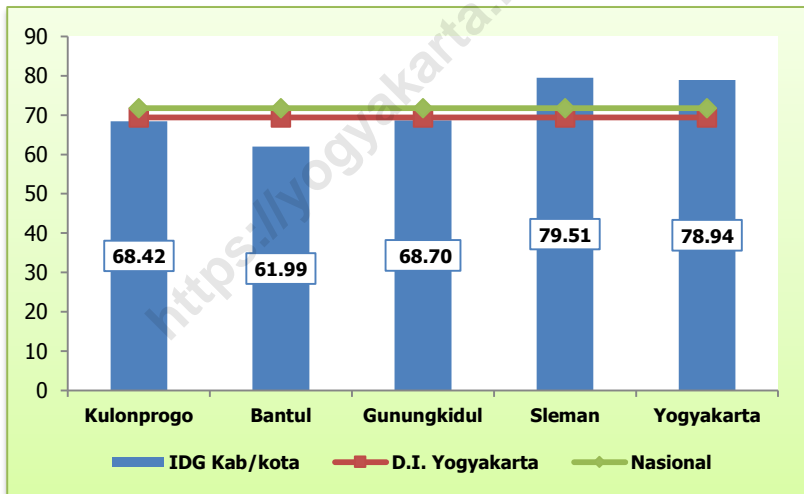
### Sumber Data

Susenas dan DPRD (untuk data keterwakilan di parlemen)

## ULASAN SINGKAT

Secara umum capaian IDG menurut kabupaten/kota tidak menunjukkan disparitas yang berarti antar kabupaten/kota. Namun demikian terjadi gap yang cukup tinggi antara IDG tertinggi dan IDG terendah. IDG tahun 2015 yang tertinggi terjadi Kota Yogyakarta sebesar 79,33 atau 6,98 lebih tinggi dari IPG terendah di Kabupaten Bantul.

**Gambar 14.3**  
**Indeks Pemberdayaan Gender, Tahun 2017**



Bila dilihat menurut kabupaten/kota, tren IDG 2013-2017 semua kabupaten/kota memberikan pola yang meningkat kecuali di Kabupaten Bantul. IDG Kabupaten Bantul tahun 2013 mencapai 68,88 dan hingga tahun 2017 turun menjadi 61,99. Sementara dari sisi disparitas, IDG Kabupaten Bantul juga lebih rendah sekitar 17,52 poin dengan IDG tertinggi yakni Kabupaten Sleman yang tercatat 79,51. Ini dapat menggambarkan bahwa

keterlibatan perempuan di Kabupaten Bantul dalam hal politik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan telah jauh tertinggal dari Kabupaten lain terutama Kabupaten Sleman.

Menurut komponen pembangunan pemberdayaan perempuan bahwa dalam hal keterlibatan perempuan di parlemen untuk perempuan Kabupaten Bantul jauh lebih rendah dari kabupaten/kota lainnya yakni baru sebesar 6,67. Sementara itu, empat kabupaten/kota lainnya nilai indeks komponen ini berkisar antara 15-26. Dilain pihak, untuk dua indeks komponen lainnya tidak terjadi disparitas yang besar antar kabupaten/kota. Akan tetapi hanya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo, yang nilai indeks persentase Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknis melebihi angka Provinsi. Sementara itu, dari indeks presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja, hanya Kota Yogyakarta yang nilai indeksnya lebih tinggi dari Provinsi.

**Tabel 14.12**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Kabupaten/kota di**  
**D.I. Yogyakarta, 2013-2017**

<b>Kabupaten/ kota</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Kulonprogo	59,26	63,68	67,26	68,42
Bantul	68,88	61,18	61,77	61,99
Gunungkidul	66,01	68,27	64,48	68,70
Sleman	72,30	79,37	77,61	79,51
Yogyakarta	71,75	79,44	79,33	78,94
<b>DIY</b>	<b>76,36</b>	<b>66,90</b>	<b>68,75</b>	<b>69,37</b>
<b>Indonesia</b>	<b>70,46</b>	<b>70,68</b>	<b>70,83</b>	<b>71,74</b>

Catatan: Data 2016, tidak tersedia

**Tabel 14.13**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi di**  
**Pulau Jawa, 2013-2017**

<b>Provinsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
DKI Jakarta	77,43	71,19	71,41	72,14	72,34
Jawa Barat	67,57	68,87	69,02	71,15	70,04
Jawa Tengah	71,22	74,46	74,80	74,89	75,10
DIY	76,36	66,90	68,75	66,96	69,37
Jawa Timur	70,77	68,17	68,41	69,06	69,37
Banten	65,49	66,91	67,94	69,14	70,00
<b>Indonesia</b>	<b>70,46</b>	<b>70,68</b>	<b>70,83</b>	<b>71,39</b>	<b>71,74</b>

**Tabel 14.14**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Komponen di D.I.**  
**Yogyakarta, 2017**

<b>Kabupaten/ kota</b>	<b>Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)</b>	<b>Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknis (%)</b>	<b>Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)</b>	<b>IDG</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Kulonprogo	17,50	54,83	33,78	68,42
Bantul	6,67	45,76	38,17	61,99
Gunungkidul	15,56	42,59	39,60	68,70
Sleman	26,00	44,31	38,43	79,51
Yogyakarta	22,50	48,75	43,95	78,94
<b>DIY</b>	<b>12,73</b>	<b>46,06</b>	<b>40,63</b>	<b>69,37</b>
<b>Indonesia</b>	<b>17,32</b>	<b>46,31</b>	<b>36,62</b>	<b>71,74</b>





DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
Aram	Angka Ramalan
Asem	Angka Sementara
Atap	Angka Tetap
<i>c to c</i>	<i>cummulative to cumulative</i>
<i>CBR</i>	<i>Crude Birth Rate</i>
<i>CDR</i>	<i>Crude Death Rate</i>
GK	Garis Kemiskinan
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non Makanan
<i>GNP</i>	<i>Gross National Product</i>
GRR	<i>Gross Reproduction Rate</i>
<i>HCI</i>	<i>Head Count Index</i>
H	<i>Headcount Ratio</i>
Ib	Indeks Harga yang dibayar petani
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKG	Indeks Kesulitan Geografi
<i>ILO</i>	<i>International Labor Organization</i>
<i>IMR</i>	<i>Infant Mortality Rate</i>
IPD	Indeks Pembangunan Desa
IPG	Indeks Pembangunan Gender

IPM	Indeks Pembangunan Manusia
It	Indeks Harga yang diterima petani
LPP	Laju Pertumbuhan Penduduk
<i>MDGs</i>	<i>Millenium Development Goals</i>
<i>MMR</i>	<i>Maternal Mortality Rate</i>
<i>MPI</i>	<i>Multidimensional Poverty Index</i>
<i>NRR</i>	<i>Net Reproduction Rate</i>
NTB	Nilai Tambah Bruto
NTP	Nilai Tukar Petani
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNB	Produk Nasional Bruto
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PSE05	Pendataan Sosial Ekonomi 2005
<i>q to q</i>	<i>quarter to quarter</i>
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SBH	Survei Biaya Hidup
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SP	Sensus Penduduk
<i>SR</i>	<i>Sex Ratio</i>
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
<i>TFR</i>	<i>Total Fertility Rate</i>
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
<i>y to y</i>	<i>year to year</i>

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Indeks Demokrasi Indonesia. 2009-2011. 2011-2013*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. *Pendapatan Nasional Indonesia 2013-2017*. 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2017*. 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten-Kota di Indonesia 2013-2017*. 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Keadaan Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2017*. 2018. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pengeluaran 2013-2017*. 2018: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2018*. 2018: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2017* . 2013-2017. Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2018* . 2018. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan usaha 2013-2017*. 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Nilai Tukar Petani 2017*. 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Indeks Harga Konsumen Kota Yogyakarta 2017*. 2018: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. 2018: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018* 2018. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*. 2018. Badan Pusat Statistik

D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara. *Laporan Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sumatra Utara Triwulan 1 2018*. 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. Situs Badan Pusat Statistik. 2018.  
<http://www.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Situs Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. 2018. <http://www.bps3400.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.kalibps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

*Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Telp. (0274) 4342234 Fax. (0274) 4342230 email: bps3400@mailhost.go.id*

ISBN 978-602-1392-43-0



9 786021 392430